

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
BKPH) SENDURO MELALUI SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL DI DESA BURNO KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS **Oleh :** ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MATHO'YANI IZZUL KHAQ
204103020003
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2024**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
BKPH) SENDURO MELALUI SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL DI DESA BURNO KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATHO'YANI IZZUL KHAQ
204103020003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2024**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
BKPH) SENDURO MELALUI SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL DI DESA BURNO KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

Matho'yani Izzul Khaq
204103020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Nasobi Niki Sunna, M. Sc.
NIP: 198907202019031003

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
BKPH) SENDURO MELALUI SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL DI DESA BURNO KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Achmad Faesol, M.Si.
NIP. 198402102019031004

Ani Qotuz Zuhro' Fitriana, S.E., M.M.
NIP. 199602242020122007

Anggota :

1. Dr. Minan Jauhari, M.Si.

2. Nasobi Niki Suma, M.Sc

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah
Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ

Artinya: Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kafir. Maka, celakalah orang-orang yang kafir karena (mereka akan masuk) neraka. (Q.S Shad [38]:27)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hal. 400

PERSEMBAHAN

Pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau yang memberikan semangat dan motivasi, dukungan serta doa, sehingga skripsi ini terselesaikan, beliau diantaranya :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Aviyah dan Bapak Abdul Kodir yang menjadi sebuah alasan dan tujuan utama saya dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Beliau yang telah senantiasa memberikan doa dan ridhonya kepada saya sehingga dapat sampai ditahap skripsi ini. Harapan besar mereka ada di saya.
2. Kakek-nenek saya, Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Sarokha beliau yang selalu memberikan saya semangat dan senantiasa memberikan motivasi yang penuh kepada saya.
3. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan saya, yang selalu menemani dan memberikan dorongan dan dukungan dikala kesulitan dan senantiasa menemani dalam mengerjakan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat keberhasilan penyelesaian program sarjana. Shalawat dan salam, senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam. M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Muhibbin, S, Ag, M.Si., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah yang telah mengizinkan mengadakan penelitian ini.
4. Bapak Achmad Faesol, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Zainul Fanani M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Nasobi Niki Suma, M. Sc. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang

telah memberikan arahan, motivasi, dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada peneliti.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang disebutkan maupun yang tidak, atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis juga berharap skripsi ini bisa berfungsi sebagai tambahan pengetahuan, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Oktober 2024
penulis,

Matho'yani Izzul Khaq

ABSTRAK

Matho'yani Izzul Khaq, 2024: “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Oleh BKPH Senduro Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, BKPH, Perhutanan Sosial,

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Namun pada faktanya permasalahan di sektor kehutanan tidak dapat terelakkan. Salah satunya di Desa Burno yakni penyalahgunaan lahan hutan, pembagian kawasan kelola hutan yang tidak merata, dan kurang pahami masyarakat akan pemanfaatan sumber daya hutan. Pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sangat penting terutama dalam mengimplementasikan skema perhutanan sosial karena masyarakat setempat memiliki peran dan hak kelola hutan secara legal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 3) Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yaitu dua metode triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bentuk pemberdayaan dari BKPH Senduro diantaranya pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. 2) Proses pemberdayaan melalui berbagai tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap implementasi program, dan tahap evaluasi. 3) Hambatan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani BKPH Senduro yaitu konflik internal lembaga, dan tingkat SDM masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	50

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	60
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	93
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

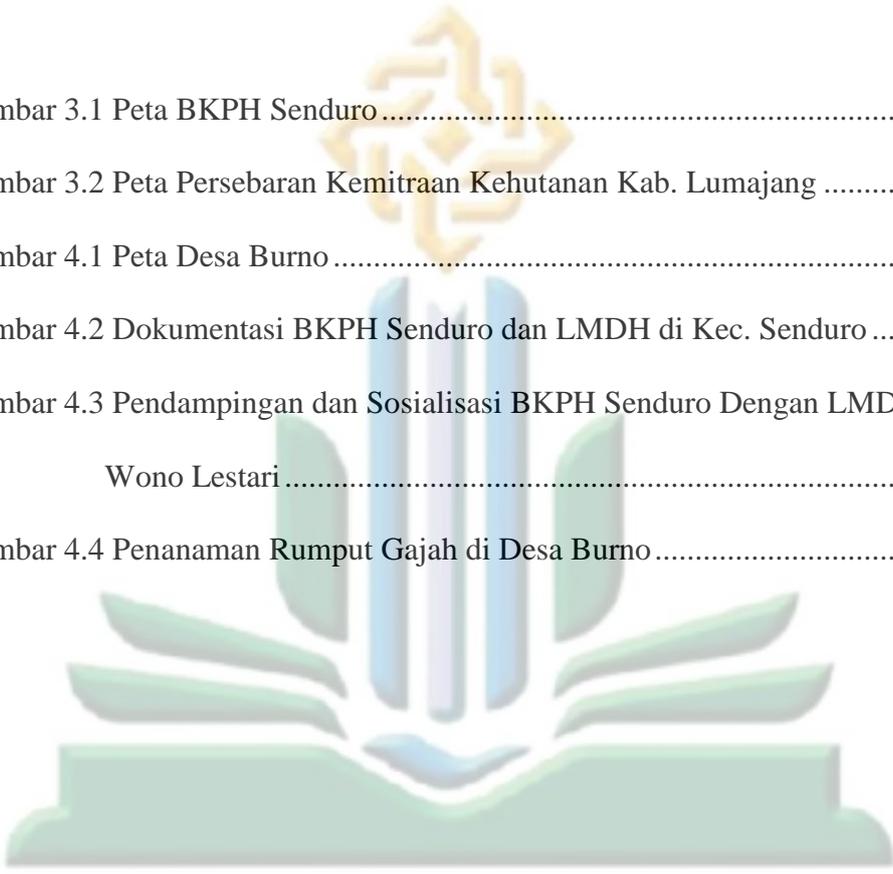
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2 Pengajuan Skema Perhutanan Sosial	49
Tabel 3.1 Struktur Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Senduro	55
Tabel 3.2 Struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Burno	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta BKPH Senduro	52
Gambar 3.2 Peta Persebaran Kemitraan Kehutanan Kab. Lumajang	53
Gambar 4.1 Peta Desa Burno	66
Gambar 4.2 Dokumentasi BKPH Senduro dan LMDH di Kec. Senduro ...	78
Gambar 4.3 Pendampingan dan Sosialisasi BKPH Senduro Dengan LMDH Wono Lestari	80
Gambar 4.4 Penanaman Rumput Gajah di Desa Burno	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia memiliki berbagai kasus permasalahan dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya peluang ekonomi di daerah tersebut. Permasalahan di sektor kehutanan pada saat ini cukup krusial apabila terus dibiarkan, seperti tidak adanya investasi berkelanjutan, kurang berkembangnya pembangunan di sektor hutan tanaman, minimnya pencegahan pembalakan dan penebangan kayu secara liar, meluasnya area hutan yang tidak dikelola dengan benar, dan menurunnya angka perekonomian masyarakat di sekitar hutan yang ditandakan dengan tingginya angka kemiskinan dari masyarakat disekitar hutan itu sendiri.

Hutan merupakan salah satu bentuk kekayaan sumber daya alam yang dimiliki rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara agar dapat dikelola dengan bijak. Hal ini bertujuan agar ekosistem dan keseimbangan ekologi dalam lingkup kehutanan bisa lebih terjaga, dengan menyediakan habitat bagi berbagai spesies yang mempertahankan hidup didalamnya, serta memberikan manfaat ekonomi dan ekosistem bagi masyarakat disekitarnya. Sejak beberapa tahun belakangan ini tanpa disadari kalau degradasi hutan di Indonesia cukup tinggi, yakni laju kerusakan 1,08 juta hektare/tahun dan lahan kritis 31,197

juta hektare. Masyarakat sekitar hutan pada umumnya merupakan masyarakat yang tertinggal dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Mereka pada dasarnya hidup dengan berbagai strategi ekonomi seperti perladangan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, rotan, madu dan lain sebagainya¹.

Pembangunan kehutanan di Indonesia mencakup berbagai program dan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang dilakukan termasuk pengelolaan hutan yang lestari, penanaman kembali hutan, serta pemberdayaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah turut terlibat dalam kerjasama internasional untuk melindungi hutan-hutan di Indonesia dengan berbagai upaya seperti untuk pengelolaan berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan kehutanan seperti dalam membuat kebijakan, mengawasi eksploitasi sumber daya hutan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.

Allah SWT telah berfirman bahwa sebagian kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini merupakan ulah manusia itu sendiri yang tidak mampu dan menjaga lingkungannya dengan baik, seperti dalam firman-Nya surat Al-Baqarah Ayat 205

¹ Syofiarti dkk, Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 6, 2023, Hal. 3.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ^ط

Artinya : Dan di antara perbuatannya ialah apabila dia berpaling dari engkau, tidak lagi bersama engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, melakukan berbagai kejahatan seperti merusak tanam-tanaman, dan membunuh binatang ternak, kepunyaan orang-orang yang beriman, sedang Allah tidak menyukai hamba-Nya berbuat kerusakan di muka bumi.(Q.S Al-Baqarah 205)²

Ayat diatas menyimpulkan bahwa Allah sangat tidak menyukai tindakan kerusakan di bumi. Faktanya di beberapa daerah terdapat permasalahan sekaligus kerusakan hutan, mulai dari tata kelola hutan yang tidak optimal, pembukaan lahan untuk pertanian, *illegal logging*, dan kebakaran hutan. Semua ini berdampak pada kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, serta kontribusi terhadap perubahan iklim global. Upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pembangunan kehutanan di Indonesia difokuskan pada program perhutanan sosial dengan menitikberatkan pemberdayaan partisipatif yang bertujuan untuk mengangkat kapasitas masyarakat disektor kehutanan terutama dalam mengelola sumber daya hutan berserta potensi yang ada didalamnya secara lestari dan mandiri. Proses pelaksanaan program perhutanan sosial ini didukung dan bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), serta Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok-kelompok masyarakat ini bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pemangku

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit, hal. 490

dari Perum Perhutani dan penyelenggara dari program perhutanan sosial. Negara mengeluarkan SK Kulin KK yaitu Izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat lokal untuk memperoleh nilai ekonomis dari hasil hutan dan meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat setempat. Program ini merupakan bentuk perhutanan sosial yang disponsori pemerintah untuk mengatasi konflik dan kerusakan lingkungan di wilayah konsesi.³ Dasar hukum pelaksanaan program perhutanan sosial adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berpegang pada asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.⁴ Negara yang dalam hal ini pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola agar sumberdaya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Maksud dan tujuan program perhutanan sosial adalah untuk membangun kesejahteraan bersama dengan memperkuat upaya dengan mendaftarkan aspek kelestarian hutan berdasarkan Peraturan Menteri

³ Kumparan, "Puluhan Petani Peroleh Legalitas Lahan Melalui SK Kulin-KK KLHK", <https://kumparan.com/jambikita/puluhan-petani-peroleh-legalitas-lahan-melaluisk-kulin-kk-klhk-luJLLmqriWf/full>, (2 Oktober 2020).

⁴ Tasya Moendy Agusti, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono, Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanafaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.2, 2020, Hal. 301.

⁵ Syofiarti dkk, Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol.6, 2023. Hal.2.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. Program perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, izin, perkumpulan dan hutan rakyat. Program ini juga memiliki tujuan untuk menjadi solusi sekaligus pemecahan masalah di masyarakat dalam pembagian dan pemerataan lahan/petak dikawasan hutan yang dikelola masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di masyarakat Desa Burno yang hidup di sekitar hutan yaitu pembagian lahan atau petak. Faktanya masih terdapat pembagian lahan/petak yang tidak merata pada setiap anggota yang terdaftar di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, sehingga dengan adanya program perhutanan sosial yang dicanangkan pemerintah ini setidaknya bisa memecah dan mengatasi dari problem sosial ini.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas wilayah hutan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kota pada tahun 2007 dan 2014 adalah 449.104,23 hektar. Kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada era pemerintahan Presiden Jokowi adalah 604.374,26 hektar, sedangkan pada tahun 2018, 239.351 KK sudah mendapatkan akses hukum dalam pengelolaan kawasan hutan negara, Terdapat 2.460 kelompok diberikan edukasi, sosialisasi serta fasilitas di bidang pengembangan ekonomi dan masyarakat dengan skema perhutanan sosial. Pada 2019, target hasil adalah 5.000 kelompok perhutanan sosial.⁶

⁶ Rimba Kita, "Perhutanan Sosial-Pengertian, Tujuan, Skema, dan Tata Cara Permohonan", <https://rimbakita.com/perhutanan-sosial/> (5 Februari 2015).

Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar hutan masih memiliki kaitan erat terutama dalam kehidupannya masih menggantungkan pada hutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan tak terkecuali di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Terdapat berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Pertama, penyalahgunaan lahan hutan. Kawasan hutan di Desa Burno terdapat sebagian yang disalahgunakan dengan banyak masyarakat setempat yang menanam tanaman yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti menanam tanaman rumput gajah pada area yang bukan pada kawasan Perum Perhutani BKPH Senduro, sehingga dapat memicu adanya konflik yang dapat mengganggu ekosistem hutan itu sendiri. Kedua, Pembagian kawasan kelola hutan yang tidak merata. Adapun hal lain yang menjadi suatu ketidakadilan bagi masyarakat sekitar hutan yaitu terdapat perbedaan luas kawasan atas hak kelola hutan dan juga terdapat masyarakat luar Desa Burno yang tidak memiliki sejarah tinggal di Desa Burno memiliki hak kelola atas kawasan hutan di Perum Perhutani BKPH Senduro, sehingga hal ini dapat menciptakan rasa iri dan dengki yang ada pada masyarakat di Desa Burno. Ketiga, kurang pemahamannya masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Banyak masyarakat yang tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan hutan tanpa memikirkan kelestarian dan fungsi hutan itu sendiri, mereka lebih mengutamakan fungsi ekonomi dari pada ekologi hutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua LMDH Wono Lestari yang terdapat di Desa Burno, LMDH Wono Lestari terdapat 661 petani anggota

yang semuanya warga Desa Burno mereka diberi kesempatan sekaligus hak melalui KULIN-KK (Pengakuan Perlindungan-Kemitraan Kehutanan) untuk memanfaatkan hutan yang terdapat di kawasan Perum Perhutani dengan cara bertanam ditegakan pohon damar untuk keperluan hijauan makan ternak (HMT) seperti rumput gajah, kaliandra dan tanaman lainnya dengan syarat tetap menjaga kelestarian hutan⁷. Komoditi pakan ternak menjadi usaha yang menguntungkan mengingat sebagian besar warga Desa Burno memiliki ternak.⁸ Masyarakat Desa Burno masih menggantungkan hidupnya terhadap hutan dikarenakan banyak terdapat masyarakat yang menjadi peternak sapi perah yang mengambil pakan Hijauan makan ternak (HMT) dari hutan wilayah Perum Perhutani yang sudah bermitra dengan LMDH. Maka dari itu dengan keluarnya PERMEN LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo yang dijalankan oleh Perum BKPH Senduro untuk dilaksanakan dengan masyarakat agar bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Desa Burno yang berada di sekitar hutan melalui proses kegiatan pemberdayaan yang menjadikan aspek kelestarian hutan sebagai pedoman.

Perum Perhutani KPH Probolinggo melalui Perhutani BKPH Senduro selaku pemangku hutan di wilayah ini memiliki peran penting dalam keberhasilan sekaligus pemanfaatan dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan masyarakat akan memperoleh

⁷ Wawancara dengan Bapak Siswanto, 25 September 2023.

⁸ Wawancara dengan Bapak Sumali, 26 September 2023.

keuntungan di segi ekonomi yaitu dengan adanya pendapatan yang mampu memberikan peran serta kontribusinya dalam mengubah perekonomian masyarakat. Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk pemerataan sektor ekonomi dalam masyarakat dan untuk mengurangi adanya ketimpangan di sektor ekonomi, yang diusahakan melalui tiga pilar yaitu lahan, pemberian kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut penting dilakukannya kegiatan yang dapat memicu adanya proses pemberdayaan dalam pengelolaan hutan berdasarkan skema perhutanan sosial yang sekaligus berpotensi mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Peneliti memiliki tujuan untuk melakukan penelitian terhadap Perhutani BKPH Senduro, sehingga peneliti dapat menuangkan hasil penelitian ini dalam skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Senduro Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu memaparkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.¹⁰ Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yaitu:

⁹ Tasya Moendy Agusti, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono, Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanafaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No.2, 2020, Hal. 301.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas, Jember, 2020), hlm 92.

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah gambaran tentang arah-arrah yang harus dituju untuk melakukan penelitian. Tujuan peneliti harus mengacu dan konsisten dengan masalah masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.¹¹

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas, Jember, 2020), hlm 93.

3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang peran sekaligus kontribusi yang akan diperoleh setelah melakukan proses penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis.¹² Maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, memperluas gagasan, ide dan menambah pengetahuan bagi anak muda maupun masyarakat agar mereka bisa menggali potensi yang dimiliki untuk terus dikembangkan dan mengkonversikannya ke dalam upaya produktif
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan serta pedoman bagi peneliti dengan topik penelitian yang sama selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk beberapa mata kuliah seperti *Perhutanan Sosial dan Studi Masyarakat Marginal* di program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas, Jember, 2020), hlm 92.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, proses dan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi modal dalam urusan pemberdayaan, mulai dari pengetahuan, skill, dan pengalaman. Sebagai bentuk pengaplikasian atas ilmu yang didapat dibangku kuliah. Selain itu, penelitian ini menjadi syarat utama bagi peneliti sebagai upaya untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- b. Bagi lembaga yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Perhutani BKPH Senduro atau lembaga lain yang berbasis perhutanan sosial.
- c. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi yang lengkap ketika akan melaksanakan penelitian yang sama di masa yang akan datang
- d. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pencapaian keluarga besar sebagai salah satu buah hasil intelektual yang bisa dijadikan untuk berbagai keperluan di lingkup akademis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjabarkan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian.¹³ Tujuannya

¹³ Zainal Abidin et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

yaitu agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah penjelasan-penjelasan vital dalam judul penelitian yang sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses tindakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, potensi, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan serta pelaksanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengimplementasian dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro yaitu dengan turut serta melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam naungan Perum Perhutani yang sudah bermitra dengan masyarakat melalui suatu organisasi yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

2. Masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok orang yang tinggal atau beraktivitas disekitar wilayah hutan. Mereka memiliki hubungan dengan hutan mulai dari penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, budaya, dan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungan. Pengimplementasian dalam penelitian ini masyarakat sekitar hutan yang berada di Desa Burno Kecamatan Senduro dinaungi oleh suatu lembaga atau organisasi yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari yang diketuai oleh Bapak Siswanto. LMDH Wono Lestari berdiri pada tahun 2006 yang perlahan mampu meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Desa Burno

dengan berbagai inovasi yang dikembangkan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) seperti, KUPS hijauan makan ternak, KUPS sapi perah, dll.

3. BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan)

BKPH merupakan bagian dari Perum Perhutani yang memiliki tugas untuk menjaga, mengawasi, dan kemanfaatan umum disektor kehutanan yang ditanggungjawabkan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan/KPH. Pengimplementasian dalam penelitian ini BKPH Senduro adalah unit operasional Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan di wilayah hutan Senduro. BKPH Senduro memiliki 4 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Senduro, RPH Besuksat, RPH Ranupane dan RPH Gucialit. Adapun peran utamanya yaitu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya hutan dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Senduro sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjalankan kebijakan Perhutani di tingkat lokal.

4. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah suatu skema atau konsep di mana masyarakat lokal atau masyarakat sekitar hutan berserta kelompok adat memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial. Perhutanan sosial di Indonesia merupakan suatu simbol dan upaya perlawanan terhadap pemerintahan pada era orde baru yang saat itu kurang memikirkan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam maupun

sekitar hutan dan lebih berpihak terhadap investor lokal maupun asing untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dengan tujuan pertumbuhan di sektor ekonomi. Pengimplementasian dalam penelitian ini skema perhutanan sosial yang diambil dari BKPH Senduro yaitu Kemitraan Kehutanan dalam bentuk KULIN KK (Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan). Perhutani dalam menjalankan skema ini yaitu bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari yang menjadi naungan dari masyarakat sekitar hutan yang ada di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi yang terdiri dari pembahasan penelitian mulai dari bab pendahuluan hingga bab akhir atau penutup. Sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdapat pokok kajian dalam pembahasan dari skripsi yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu : 1). konteks penelitian, 2). fokus penelitian, 3). tujuan penelitian, 4). manfaat penelitian, 5). definisi istilah, 6). sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang penyajian tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan teori-teori yang relevan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan ketika melakukan penelitian, hal tersebut dapat diketahui melalui pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek yang diteliti, cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap pada penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjabarkan tentang penjelasan data yang telah ditemukan di lapangan, dan melakukan analisis data teori yang terdapat pada bab dua dan bab tiga yang berkaitan dengan pandangan objek penelitian, data yang disajikan, analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sekaligus berisi saran dari peneliti mengenai objek yang sudah diteliti. Bab ini merupakan sub atau bagian paling akhir dari tulisan ilmiah yang ditulis oleh penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini dapat disajikan berbagai temuan dari penelitian terdahulu.

Peneliti membahas dan mengumpulkan gambaran umum tentang penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (tesis, disertasi, skripsi, makalah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan lain sebagainya).¹⁴

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Iwan Jazadi, Muhammad Irham, Iga Widari, Suparman, Riska Julianti Adelismula, dalam jurnal Pengabdian Makarya Vol.2 No.1 Tahun 2023 dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry*”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan pemanfaatan hutan dengan pola *agroforestry*. metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu masyarakat bisa mendapatkan pendapatan bulanan, jangka menengah dan jangka panjang dari hasil *agroforestry*. *Agroforestry* yang diterapkan yaitu kombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian.
2. Husnul Jannah, Iwan Desimal, Nita Erista, Baiq Muli Harisanti, Nurtajudin, Sri Nopita Primawati, dalam jurnal Hasil Pengabdian &

¹⁴ Zainal Abidin et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

¹⁵ Iwan Jazadi dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry”, Jurnal Pengabdian Makarya Vol.2 No.1, 2023.

Pemberdayaan kepada Masyarakat Vol.4 No.4 Tahun 2023 dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Melalui Penataan Lahan Kosong untuk Apotik Hidup di Hutan Kota Giong Siu Mataram*”.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berbasis lingkungan melalui penataan lahan kosong di hutan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perlu adanya suatu pendekatan dengan tahapan-tahapan sebelum melakukan penanaman tanaman obat. Dimulai dari penataan lahan sehingga bisa menciptakan lahan kosong untuk dijadikan sebagai apotik hidup di Hutan Kota Giong Siu Mataram.

3. Warsono, Soetriono, Jani Januar, dalam Jurnal JSEP Vol. 7 No. 2 tahun 2024 dengan judul “*Strategi Pembedayaan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Baung Dalam Upaya Mengurangi Perambahan Hutan*”. Penelitian ini berfokus pada motivasi masyarakat dalam program pemberdayaan dengan adanya pemanfaatan rumput gajah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan ditentukan secara sengaja (purposive method). Hasil penelitian ini yaitu motivasi masyarakat terhadap program pemberdayaan termasuk dengan kriteria tinggi dengan adanya rumput gajah yang berdampak baik pada ekonomi masyarakat setempat.
4. Syofiarti, Titin Fatimah, Kevin Muhammad Yades, dalam Unes Journal od Swara Justisia Vol. 6 Tahun 2023 dengan judul “*Pengelolaan Hutan*

¹⁶ Husnul Jannah dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Melalui Penataan Lahan Kosong untuk Apotik Hidup di Hutan Kota Giong Siu Mataram”, Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat Vol.4 No.4 2023.

Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat".¹⁷ Penelitian ini berfokus pada pemberian akses kepada masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan dengan salah satu skema Perhutanan Sosial yaitu pengelolaan hutan desa yang diberikan kepada masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan diarahkan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan (LPH). Konflik bisa teratasi dalam pengelolaan hutan nagari yaitu dengan melibatkan kaum, karena karakter dari masyarakat yang patuh dan tunduk akan aturan dan ketentuan hukum adat dan ninik mamak.

5. Nur Awaliyah Reski, Yusran Yusran, Makkarennu, dalam jurnal hutan dan masyarakat Vol. 9 No. 1 tahun 2022 dengan judul "*Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan*". Penelitian ini berfokus pada . Pengembangan usaha jasa lingkungan antara lain rencana pengembangan usaha perdagangan karbon (carbon trading). Dengan demikian rencana pemanfaatan jasa lingkungan seperti ini mempunyai peluang yang cukup menarik bagi masyarakat Desa Pacekke agar percaya bahwa upaya perlindungan hutan akan sulit dilakukan jika manfaat terhadap lingkungan tersebut tidak dinilai secara layak dengan uang atau melalui sistem pembayaran.

¹⁷ Syofiarti dkk, "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat", Unes Journal od Swara Justisia, Vol. 6, 2023.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pacekke saat ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap program pemerintah dan pihak lainnya. Lemahnya akses masyarakat terhadap modal, pasar dan iptek sehingga menyebabkan posisi tawar masyarakat dalam kemitraan rendah. Kerusakan hutan akan semakin meningkat karena masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan hutan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Iwan Jazadi, Muhammad Irham, Iga Widari, Suparman, Riska Julianti Adelismula (2023)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini juga terletak pada konteks penelitian yang membahas tentang pelestarian dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan.	perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini skema yang digunakan yaitu perhutanan sosial, sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu lebih fokus pada pola agroforestry
2	Husnul Jannah, Iwan Desimal, Nita Erista, Baiq Muli Harisanti, Nurtajudin, Sri Nopita Primawati (2023)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Melalui Penataan Lahan Kosong untuk Apotik Hidup di Hutan Kota Giong Siu Mataram	Persamaan dalam penelitian ini yaitu suatu pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian. Perbedaannya juga terdapat pada tujuan pemanfaatan yang mana dalam penelitian ini lebih fokus dalam skema perhutanan sosial, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih fokus pada penataan lahan kosong untuk apotik hidup.
3	Warsono,	Strategi Pembedayaan	Persamaan antara	Perbedaan peneliti ini

	Soetriono, Jani Januar (2024)	Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Baung Dalam Upaya Mengurangi Perambahan Hutan	penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema penelitian yang mana fokus pada pemberdayaan. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian.
4	Syofiarti, Titin Fatimah, Kevin Muhammad Yades (2023)	“Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat”	Persamaan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan Skema Perhutanan Sosial.	Perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, meskipun sama-sama menggunakan Skema Perhutanan Sosial tapi skema yang digunakan yaitu Hutan Desa.
5	Nur Awaliyah Reski, Yusran Yusran, Makkarenu, (2022)	Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.	Persamaan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dengan skema perhutanan sosial.	Perbedaan yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan lembaga yang memberdayakan. Pada penelitian terdahulu lembaga yang memberdayakan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH), sedangkan pada penelitian kali ini lembaga yang memberdayakan yaitu Perhutani BKPH Senduro.

Sumber : Penelitian terdahulu

Berdasarkan lima judul penelitian terdahulu, terdapat beberapa pembaruan dari penelitian yang peneliti, seperti pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Penelitian terdahulu rata-rata pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, kecuali judul nomor tiga pemberdayaan masyarakatnya dilakukan oleh KPH. Kemudian yang menjadi aspek keterbaruan dari penelitian ini yaitu lebih detail pada skema perhutanan sosial yang dilaksanakan, yaitu skema kemitraan kehutanan yang tidak ada pada penelitian terdahulu lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, skema kemitraan kehutanan yang dilaksanakan yaitu Perum Perhutani BKPH Senduro bermitra/kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari. Aspek keterbaruan pada penelitian ini yaitu skema perhutanan sosial yang dilaksanakan memberikan ruang untuk masyarakat sekitar hutan agar bisa terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa inggris yaitu "*Empowerment*". Pemberdayaan sendiri berasal dari kata "*power*" yang menunjukkan kapasitas untuk mencapai, menyelesaikan, melakukan, atau memampukan. Awalan "*em*" pemberdayaan dapat

merujuk pada kekuatan batin atau sumber kreatif seseorang.¹⁸ Setiap manusia memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan aktifitas yang mereka jalani, setiap aktifitas yang mereka jalani pasti menimbulkan harapan-harapan dari seseorang terdekat, semisal dalam peranan yang berhubungan dengan dunia pekerjaan, pasti seseorang diharapkan bisa menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan peran yang dijalannya.¹⁹

Menurut Merrian Webster dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, pemberdayaan atau empowerment memiliki dua arti yaitu:

1) *To give ability or enable to*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti dapat memberikan kemampuan atau tanggap untuk melakukan sesuatu.

2) *To give power of authority to*, memiliki arti memberi wewenang atau kekuasaan.²⁰

Beberapa ahli mendefinisikan pemberdayaan pada dasarnya adalah membantu individu *ataupun* kelompok masyarakat mendapatkan kekuatan untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan yang harus diambil terkait diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek dari hambatan pribadi dan sosial untuk bertindak. Definisi ini adalah

¹⁸ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED (Center for Enterprenship Development, 2005), Cet. Ke-1, h.53.

¹⁹ David berry, *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*,(Jakarta.CV, Rajawali,1981),hlm 99.

²⁰ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2019), Cet. Ke-1, h.1.

bagaimana “pemberdayaan” diterjemahkan. Hal ini dilakukan dengan memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri dan keterampilan untuk menggunakan kekuatan yang telah mereka miliki, termasuk kemampuan untuk memberikan kekuatan kepada lingkungan mereka.²¹

Sedangkan menurut Gunawan, pemberdayaan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah sosial dengan modifikasi kapasitas sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi tuntutan sosial, pemberdayaan masyarakat mengacu pada tindakan sosial di mana penduduk dalam kelompok masyarakat itu sendiri mengembangkan rencana dan tindakan kolektif.²² Proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk membawa perubahan, memberi sekelompok orang yang tidak berdaya atas diri mereka sendiri untuk menjadi mandiri dan berdaya melalui proses dan tahapan kerja sama yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.²³

Berdasarkan ragam definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan *masyarakat* adalah sebuah proses pembangunan yang membawa perubahan kepada individu atau kelompok yang tidak berdaya, selain itu, pemberdayaan mengacu pada tindakan sosial yang membawa perubahan ke arah lebih baik melalui rencana bahkan

²¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Cet. Ke-1, h.2.

²² Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makassar: De La Macca, 2018), 10.

²³ Hairudin La Patilaiya, James Sinurat, Budi Sarasti, Sri Jumiayati, Asep Supriatna, Budi Hartono, Urhuhe Dena Siburian, Mahaza, Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari, Pemberdayaan Masyarakat, (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) Cet Ke-1, 2.

tindakan kolektif dan membantu masyarakat agar mampu mengelola kemampuan, bakat, minat yang dimiliki setiap individu supaya masyarakat dapat melakukan pemberdayaan berkelanjutan. Makna lain menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hidup mereka itu sendiri.

b. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan atau tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan *dengan* pernyataan yang dikemukakan oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E Nainggolan.²⁴

1) Tahap Persiapan

Ada dua tahap yang harus dilakukan, pertama menyiapkan pelaku pemberdayaan masyarakat, yang kedua mempersiapkan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara individu maupun kelompok. Untuk mencapai keberhasilan program atau kegiatan pemberdayaan dengan baik, pelaku pemberdayaan masyarakat harus memiliki persiapan yang cukup matang.

2) Tahap Pengkajian

Langkah ini melibatkan proses penilaian, yang dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok masyarakat.

²⁴ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Cet. Ke-1, h.13.

Pengimplementasian dalam hal ini pelaku pemberdaya masyarakat harus memahami dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, sehingga persoalan yang ada di masyarakat dapat teratasi sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pengkajian ini sangat penting dilakukan agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efisien.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahap ini pelaku pemberdaya masyarakat sebagai "*Exchange Agent*" yang melibatkan masyarakat ikut serta berpikir dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Masyarakat *diminta* untuk menciptakan suatu alternatif program kegiatan yang mungkin

terlaksana dalam situasi ini, agar nantinya dapat menunjukkan kegiatan yang paling berhasil dan efisien dalam memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Agen perubahan membantu setiap kelompok dalam merumuskan dan memilih program yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, agen perubahan membantu memformalkan konsep-konsep mereka ke dalam bentuk tulisan, terutama dalam konteks pengajuan proposal kepada penyandang dana.

5) Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Tahap implementasi ini masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

7) Tahap Terminasi

Tahapan terakhir, proyek harus berhenti. Sebab, masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik dengan maksud mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarga.

c. Bentuk-bentuk Pemberdayaan masyarakat

Terdapat berbagai bentuk pemberdayaan yang berjalan di lingkungan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh A. Hardiansyah sebagai berikut.²⁵

1) Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial melibatkan kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk

²⁵ A. Hardiansyah, Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023), Cet, Ke-1, h 16-30,

pemerintah dan non pemerintah, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri.

2) Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi mencakup pendekatan seperti pengembangan kewirausahaan dan pembiayaan mikro. Hal ini tentunya membantu individu atau kelompok untuk memulai usaha mereka atau memulai usaha yang sudah ada.

3) Pemberdayaan politik

Pemberdayaan politik melibatkan individu atau kelompok dan peran lebih aktif dalam dunia politik, mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik, dan memastikan hak-hak politik seperti pemilihan umum dan proses politik

4) Pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan lingkungan merupakan upaya untuk memberikan individu atau kelompok memiliki peran lebih aktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan alam mereka. Ini termasuk langkah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mempromosikan lingkungan berkelanjutan, dan memberikan sumber daya dan pengetahuan untuk menjaga lingkungan yang lestari. Pemberdayaan berbasis pendekatan lingkungan (*Ecology Empowerment*) perlu dilakukan dalam menangani dan

menjembatani kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga hutan lindung²⁶

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja demi tercapainya suatu keberhasilan. Ada empat aspek penting yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pelatihan dan dukungan terhadap masyarakat miskin, yaitu²⁷:

1) Motivasi

Proses pemberdayaan pastinya memiliki tujuan untuk benar-benar memberdayakan masyarakat, sangat penting bagi mereka untuk memahami pentingnya persatuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pembentukan organisasi yang dapat secara efektif merencanakan dan melaksanakan inisiatif pengembangan masyarakat desa. Setelah itu, kelompok ini terinspirasi untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya atau keterampilan mereka sendiri.

2) Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Meningkatkan kesadaran dan memberikan pengembangan keterampilan dapat membantu masyarakat miskin untuk

²⁶ Nasobi Niki Suma , Noviana Mariatul Ulfa , Nur Azizah Jamilah, Eco-Empowerment: Memberdayakan Membatik Warna Alam Dan Menjaga Lingkungan Masyarakat Pinggiran Taman Nasional Meru Betiri Desa Wonosari Kabupaten Jember, Jurnal At-Tatwir, Vol.7, No. 1, 2020

²⁷ Totok, Mardikanto, dan Poerwako Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.167-170.

membangun sarana penghidupan yang mandiri dan bahkan meningkatkan kemampuan kerja mereka

3) Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus memilih pemimpinnya sendiri dan merencanakan kegiatannya sendiri, termasuk pertemuan dan diskusi, pencatatan, penyelesaian perselisihan, dan tugas-tugas administrasi masyarakat lainnya.

4) Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

Organisasi masyarakat harus diorganisir dengan lebih baik, dan hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas anggota untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan berbagai sistem sosial di lingkungan terdekat mereka. Jaringan-jaringan ini sangat membantu dalam memberikan atau memperluas akses

masyarakat miskin terhadap peluang dan sumber daya untuk pemberdayaan mereka.

e. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat

1) Faktor pendukung

Menurut Hamzah B. Uno, faktor pendukung dalam proses pemberdayaan yakni motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang terdapat dalam diri individu dan ditunjukkan dengan adanya kebutuhan dan keinginan, tujuan dan cita-cita, kehormatan dan harapan, serta hasrat dan minat. Motivasi inilah

yang mendorong perilaku membuat seseorang melakukan tindakan.²⁸

2) Faktor Penghambat

Pelaksanaan suatu kegiatan pemberdayaan pastinya tidak jarang mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Ibrahim terdapat enam faktor utama hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan, yaitu²⁹:

- 1) Kurang tepatnya perencanaan
- 2) Adanya konflik
- 3) Inovasi tidak berkembang
- 4) Masalah finansial
- 5) Penolakan dari kelompok tertentu
- 6) Kurang adanya hubungan social

f. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Wijaya menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan dan membangkitkan semua kemampuan didalam diri masyarakat, untuk mencapai tujuan meningkatkan dorongan, inisiatif, inovasi, serta penghargaan dan pengakuan terhadap mereka yang berprestasi. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Suryana adalah untuk membantu orang dan masyarakat menjadi mandiri. Sedangkan menurut Sulistiyani, pemberdayaan menekankan bahwa pembentukan individu dan masyarakat yang

²⁸ Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 2011.

²⁹ Haqqie, S. N. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan. Semarang: Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2016.

mandiri adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakannya.³⁰

2. Masyarakat Sekitar Hutan

a. Pengertian masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok manusia yang tinggal atau memiliki keterkaitan dengan wilayah hutan secara geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Mereka bisa termasuk dalam berbagai kelompok seperti petani, peternak, dan lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar hutan untuk kehidupan mereka. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor. 48 tahun 2008 tentang Hutan Desa, masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.³¹ Masyarakat sekitar hutan adalah mereka yang tinggal atau bekerja di wilayah yang berdekatan dengan hutan, dan mereka sering bergantung pada sumber daya alam yang diberikan oleh hutan untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka.

³⁰ Hairudin La Patilaiya, James Sinurat, Budi Sarasti, Sri Jumiya, Asep Supriatna, Budi Hartono, Urhuhe Dena Siburian, Mahaza, Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari, Pemberdayaan Masyarakat, (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) Cet Ke-1.

³¹ Dodirman, Skripsi: “Analisis Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).

Masyarakat sekitar hutan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang pada umumnya tergolong dalam masyarakat ekonomi rendah sehingga kecemburuan sosialnya pada kawasan hutan tidak dapat dihindarkan terhadap pelaksanaan pembangunan disektor kehutanan, oleh karena itu masyarakat hutan sangat mengharapkan dari sumber daya hutan dapat menjadi hal yang utama di sektor ekonomi.

b. Ciri-ciri masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan yang tinggal disekitar hutan dengan keseharian dan mata pencaharian sangat bergantung pada sektor hutan dan kehutanan. Masyarakat sekitar hutan umumnya mendiami kawasan sekitar hutan dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan serta pengelolaan hutannya. Dengan ciri-ciri umumnya yaitu :

1) Ketergantungan pada sumber daya alam

Masyarakat sekitar hutan sangat bergantung pada sumber daya alam yang tersedia dikawasan hutan.

2) Ketergantungan pada aktivitas hutan

Aktivitas ekonomi utama masyarakat sebagian besar terkait dengan kegiatan hutan. Seperti pertanian, perburuan, pengembalaan, dan pengumpulan hasil hutan.

3) Keterikatan budaya dan tradisi

Masyarakat sekitar hutan sering kali memiliki budaya dan tradisi yang terkait erat dengan lingkungan hutan. Termasuk mitos, legenda, dan praktik keagamaan.

4) Pengetahuan tradisional

Mereka biasanya memiliki pengetahuan tradisional yang kaya tentang flora, fauna, dan ekosistem hutan yang telah diturunkan secara turun-temurun.

5) Struktur sosial yang khas

Masyarakat sekitar hutan memiliki struktur sosial yang khas, dengan pembagian tugas dan peran yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi.

6) Keterhubungan dengan alam

Masyarakat sekitar hutan cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan lingkungannya, serta memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

7) Tantangan dan konflik

Masyarakat sekitar hutan sering mengalami tantangan dan deforestasi, konflik dengan industry ekstraktif, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka.

8) Adat dan kebudayaan

Mereka sering menerapkan aturan adat dan kebiasaan tertentu dalam mengelola sumber daya alam, yang menjadi bagian integral dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar hutan.

Aktor pemberdayaan yang berperan dalam sub bab kajian teori ini yaitu masyarakat sekitar hutan berada di Desa Burno Kecamatan

Senduro Kabupaten Lumajang. Masyarakat sekitar hutan di nahkodai langsung oleh Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan Wono Lestari yang diketuai oleh Bapak Siswanto, sehingga hal ini menjadikan Bapak Siswanto beserta Ketua KUPS yang terdapat di pengurusannya menjadi pemeran utama sekaligus aktor pemberdayaan yang mewakili dari masyarakat sekitar hutan.

3. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)

a) Pengertian BKPH

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan merupakan kekuasaan terendah pengelolaan hutan negara Perum Perhutani yang bertanggung jawab kepada KPH. Perhutani merupakan perusahaan yng mengatur tentang kehutanan di Indonesia yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (PERUM) yang memiliki tugas dan wewenang untuk perencanaan, pengurusan, dan pelestarian.

Didirikan pada tahun 1972 Perum Perhutani beberapa kali mengalami perubahan dasar hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.15 Tahun 1972 tentang pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum. Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah no.30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Perhutanan Negara mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan hutan di Pulau Jawa, dengan wilayah hutan yang dikelola seluas 2,426 juta hektar,

terdiri dari hutan produksi seluas 1,767 juta hektar dan sisanya hutan lindung³². Berdasarkan struktural Perum Perhutani berada dibawah Kementerian Negara BUMN dengan Pembina Teknis Departemen Kehutanan.

b) Ciri-ciri Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)

Dalam menjalankan tugasnya Perum Perhutani terdiri dari beberapa kelas/divisi. Divisi terendah dari lingkup perhutani yang memiliki kepala dan strukturnya yaitu BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan). Adapun ciri-ciri dari BKPH yaitu:

1) Fokus pada pengelolaan hutan

BKPH berfokus pada pengelolaan hutan untuk produksi kayu dan non kayu secara lestari, sehingga dalam hasil olah hutan bisa membawa efek yang baik untuk instansi dan menaikkan nilai ekonomis.

2) Memiliki struktur dan organisasi

BKPH memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik mulai dari KBKPH sampai tingkat Mandor, termasuk staff yang sudah terlatih dalam pengelolaan hutan sehingga instansi dari BKPH ini memiliki kelembagaan yang kuat untuk menjamin kehidupan anggota kedepannya.

³² Shinta Mustika Haryanti, "Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutann", Universitas Negeri Semarang, 2009.

3) Kerja sama dengan masyarakat

BKPH merupakan tingkat terendah dalam Perum Perhutani sehingga sering kali berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan seperti skema perhutanan sosial. BKPH memiliki jalinan erat dengan masyarakat lokal untuk bermitra sekaligus bekerja sama untuk pengelolaan hutan

4) Konservasi dan produksi

Memiliki tugas menjaga kelestarian hutan, BKPH juga bertanggung jawab untuk memastikan produksi kayu dan hasil hutan lainnya secara berkelanjutan. Hasil ini BKPH bisa mendapatkan income dari hasil hutan ini.

5) Penerapan teknologi

Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan hutan, termasuk sistem informasi geografis (SIG) dan pemantauan kelestarian hutan. BKPH disupport dengan teknologi yang canggih untuk menjamin dan memantau hasil hutan kedepannya.

6) Kepatuhan terhadap regulasi

BKPH harus mematuhi peraturan dan regulasi terkait pengelolaan hutan yang berlaku di Indonesia dalam menjaga tugas di lingkup kehutanan

c. Tujuan didirikan Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)

Perum perhutani selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tujuan dalam mengelola hutan negara sesuai kebijaksanaan Pemerintah, yaitu :

1) Menjamin kelestarian sumber daya hutan

Perum Perhutani memegang peran penting dalam menjamin kelestarian sumber daya alam dengan memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya hutan yang dimiliki. Perum Perhutani konsisten mulai dari Divisi Regional (Divre), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Adapun dalam mencapai hal tersebut, Perum Perhutani perlu melakukan beberapa langkah yaitu:

- a) Pengelolaan hutan berkelanjutan
 - b) Perlindungan keanekaragaman hayati
 - c) Penguatan hukum dan kebijakan
 - d) Partisipasi masyarakat lokal
 - e) Teknologi dan inovasi
 - f) Kerjasama internasional
- 2) Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang optimal

Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan optimal melibatkan berbagai strategi yang mencakup

efisiensi agar tercipta suatu keuntungan dari adanya kegiatan di sektor kehutanan. Berikut beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a) Efisiensi operasional
 - b) Inovasi produk dan layanan
 - c) Peningkatan pemasaran dan penjualan
 - d) Manajemen keuangan yang baik
 - e) Pengembangan sumber daya manusia
 - f) Kolaborasi dan kemitraan
- 3) Meningkatkan peranan Perum Perhutani dalam pembangunan wilayah

Peningkatan pembangunan wilayah, perhutani meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

serta peran yang bisa dilakukan oleh Perum Perhutani. Adapun beberapa cara untuk meningkatkan peranan Perum Perhutani antara lain:

- a) Pengelolaan hutan lestari
- b) Pemberdayaan masyarakat lokal
- c) Pengembangan wisata hutan
- d) Diversifikasi produk hutan
- e) Kerjasama dengan pemerintah dan swasta
- f) Pemanfaatan teknologi digital

Aktor pemberdayaan yang berperan dalam sub bab kajian teori ini yaitu Perum Perhutani BKPH senduro selaku pihak pemberdaya masyarakat sekitar hutan yang berada di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Hal ini dikarenakan wilayah yang digunakan dalam pengimplementasian skema perhutanan ini masuk pada kawasan hutan milik Perum Perhutani BKPH Senduro, sehingga seluruh pihak mulai dari Asper, Mantri dan Mandor memiliki peran penuh dalam proses pemberdayaan sesuai kapasitasnya masing-masing.

Adapun pembagian tugas dari berbagai jabatan dalam Perum Perhutani BKPH Senduro yaitu Asper Gatot Kuswinaryono yang menjadi pemilik jabatan tertinggi dalam BKPH Senduro sehingga beliau menjadi orang yang bertanggung jawab penuh atas jalannya proses pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial ini. Mantri Deni Indra Kesuma memiliki tugas pengawas sekaligus menjadi pelaksana hal ini dikarenakan beliau yang turun langsung dengan masyarakat untuk mengawal penuh proses pemberdayaan ini. Mandor Sutari memiliki tugas membantu tugas Mantri di lapangan ketika proses pemberdayaan berlangsung.

4. Perhutanan Sosial

a. Pengertian perhutanan sosial

Perhutanan sosial adalah konsep yang mengacu pada pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal atau komunitas yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam

pengambilan keputusan, pemantauan, dan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi serta sosial masyarakat lokal. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan dengan menjadikan masyarakat setempat sebagai peran utama untuk menciptakan kesejahteraan, keseimbangan dan lainnya. Pelaksanaan program ini harus didukung dan disupport oleh lembaga masyarakat yang sehat, baik di tingkat makro yang dalam hal ini yaitu pengelolaan kawasan maupun di tingkat mikro yaitu masyarakat desa hutan.

Peran Perum Perhutani dalam program perhutanan sosial berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 dan perubahannya pada PP No. 3 Tahun 2008, Perum Perhutani mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan, menguraikan kebijakan kehutanan yang akan dilaksanakan di bidang kehutanan pada tingkat federal, negara bagian, dan kabupaten, menyelenggarakan kegiatan kehutanan di wilayahnya.³³

Sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat skema perhutanan sosial dimulai dari pengembangan serta penguatan masyarakat di lingkup sekitar hutan, memberikan akses pengelolaan lahan yang masuk dikawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Skema ini berperan dalam upaya penyelesaian konflik sumber daya

³³ Yando Zakaria dkk, Perhutanan Sosial: Dari Slogan menjad Program. (Jakarta: Sekertariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 2018) 58.

hutan antara pengelola hutan dengan unit pengelolaan hutan dan masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan hutan.

b. Skema perhutanan sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang terdiri dari beberapa skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program ini sah dan legal dan menjadikan masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan hutan guna menaikkan nilai ekonomis. Perhutanan sosial mampu mengatasi anggapan dari sebagian masyarakat tentang sulitnya memanfaatkan kawasan area hutan di sekitar mereka. Kepentingan sosial meliputi akses masyarakat pada sumber daya hutan.³⁴ Pelaksanaan skema perhutanan sosial ini pastinya harus memiliki banyak akses terhadap pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat sekitar hutan beserta lembaga yang terkait seperti Perum Perhutani perlu banyak terobosan dalam pelaksanaan skema perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan setiap wilayah atau kawasan hutan memiliki perbedaan geografis, topologi, serta lingkungan penunjang lainnya sehingga dalam pelaksanaan skema perhutanan sosial mestinya disesuaikan dengan problem serta potensi yang bisa dikembangkan dari adanya skema ini.

³⁴ Haris Gunawan dkk, "Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut", Jurnal Ilmu Kehutanan Vol.13 No.2, 2019

Ada 5 bentuk skema implementasi Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Kehutanan.³⁵

1) Hutan Adat (HA)

Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat adat yang dalam pengelolaan hutannya masyarakat adat mempunyai pengetahuan dan pemahaman secara turun temurun untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitar tempat mereka secara tradisional. Semenjak berlakunya UU tentang kehutanan, wilayah hutan adat dijadikan sebagai hutan negara untuk diserahkan kepada pemilik modal untuk dieksploitasi tanpa melihat hak serta kearifan lokal.

Skema Hutan Adat mestinya melibatkan peraturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati oleh masyarakat adat, pemerintah, dan pihak lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Skema hutan adat dapat mencakup aspek-aspek seperti hak kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, pemetaan wilayah, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2) Hutan Desa (HD)

Hutan desa adalah bagian dari kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat secara kolektif atau individual, dengan

³⁵ Ppid.menlhk.go.id, *Perhutanan Sosial Bukti Pemerintah Ada Untuk Rakyat*, KLHK, 23 September, 2017, [https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/789#:~:text=Ada%20lima%20bentuk%20skema%20implementasi,HKm\)%2C%20dan%20pola%20Kemitraan.](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/789#:~:text=Ada%20lima%20bentuk%20skema%20implementasi,HKm)%2C%20dan%20pola%20Kemitraan.)

perlakuan hukum dan dukungan pemerintah untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu. Tujuan pengelolaannya dapat mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Terkhusus desa yang berada di wilayah hutan yang terisolir mendapat akses untuk pemanfaatan perhutanan sosial. Program ini diklaim memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan.³⁶

Ijin Usaha Hak Pengelolaan Hutan Desa (IU-HPHD) bukan merupakan hak milik dalam kawasan hutan, dan tidak boleh memindah-tangankan atau menjual atas lahan yang dikelola tersebut. Hak pengelolaan hutan desa terdiri dari Hak Pengelolaan, IUPHHK, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK. Hak pengelolaan ini tidak memiliki jangka waktu karena ditentukan oleh desa sendiri melalui lembaga pengelola hutan desa yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa, kecuali IUPHHK yang mengikuti ketentuan pasal 49 s/d 59 PP No.6 Tahun 2007 Jo PP. 3 Tahun 2008.

3) Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan kemasyarakatan adalah skema dalam perhutanan sosial dimana masyarakat lokal atau komunitas mendapat tugas

³⁶ Zuhda Mila Fitriana dkk, "Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa", Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023.

untuk mengelola hutan secara kolektif untuk kepentingan bersama. Pengimpleaenasian dalam hal ini pastinya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemeliharaan hutan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hutan kemasyarakatan pemanfaatan hutan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan pihak yang menjadi pemohon untuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan yaitu ketua kelompok masyarakat seperti Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) maupun Ketua Koperasi. Pemohon yang disetujui dalam permohonan pemanfaatan hutan kemudian akan memperoleh izin usaha pemanfataan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.³⁷

Proses pengajuan perizinan IUPHKm, kelompok masyarakat akan mendapatkan pemanfataan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi setiap 5 tahun. Pemanfaatan HKm pada hutan produksi meliputi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

³⁷ Yulia Neta dkk, Hutan Kemasyarakatan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri”, (Bandar Lampung: Penerbit Pusaka Media 2019), hlm. 16.

4) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Skema HTR awal mula tercetus dikarenakan tingginya permintaan kayu sehingga masyarakat ingin membuka lahan hutan dengan demikian alih fungsi hutan mengalami peningkatan signifikan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab permasalahan kehutanan salah satunya adalah dengan memperbaiki tata kelola sumber daya hutan.³⁸ Hutan tanaman rakyat dalam skema perhutanan sosial mengacu pada area atau kawasan hutan negara bisa berupa hutan produksi yang dikelola oleh masyarakat lokal atau kelompok masyarakat setempat untuk dijadikan mata pencaharian dengan pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Bagi masyarakat yang ingin menerapkan skema hutan tanaman rakyat harus memohon dan mengajukan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR. Syarat pengajuannya yaitu masyarakat harus berkelompok menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut).

5) Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan merupakan skema perhutanan sosial yang digagas sebagai salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, dengan memberikan akses bagi masyarakat setempat untuk mengelola lahan atau tanah di kawasan

³⁸ Anniza Faradhana dkk, "Peran Hutan Tanaman Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani", Jurnal Belantara Vol.2, No.2, 2019.

hutan yang telah dibebani hak pada wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pelaksanaan skema kemitraan kehutanan dilaksanakan berbasis pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/2013.³⁹ Skema kemitraan yang sudah menjalin kerjasama ini harus terlibat aktif dalam memfasilitasi menyusun kebijakan, memfasilitasi kegiatan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait sekaligus uji coba implementasinya.

Kemitraan/Partnership yang bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam hal ini ada pada wilayah BKPH/KPH yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. LMDH menjadi wadah dalam pengorganisasian masyarakat sekitar hutan dengan berbagai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidangnya. LMDH diharapkan mampu mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses terhadap hutan, serta terlibat penuh dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang dan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional dalam pemanfaatan hutan.

Skema perhutanan sosial yang di terapkan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu skema kemitraan kehutanan. Kabupaten Lumajang menjadi lokasi pilot project

³⁹ Hasantoha Adnan dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan", (Jakarta Selatan: Penerbit Kemitraan Partnership 2015), hlm. 4.

model pengembangan wilayah terpadu berbasis hutan sosial.⁴⁰ Konsep ini melibatkan berbagai stakeholder yang terkait mulai dari Kementerian/lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, dengan kehutanan sebagai leading sector. Area pengembangan perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Lumajang yaitu seluas 4.189 hektare. terdapat 5 program yang dikembangkan, yaitu :

- a) Agrosilvopastura, yaitu tentang integrasi agroforestry dan ternak.
- b) Agroindustri, yaitu untuk mengembangkan industri lokal seperti hasil hutan berupa kopi, susu sapi, kripik pisang, dan kripik talas.
- c) Ekowisata, mencakup Siti Sundari, Wisata Ranu Pani, B29 Agrosari, dan Buper Glagaharum.
- d) Agrikultur, Program pemulihan ekosistem kawasan Danau Ranu Pani.
- e) Akses hutan sosial, redistribusi lahan, dan penataan pemukiman di kawasan hutan.

Luas area perhutanan sosial yaitu seluas 940 hektare di Desa Burno dikelola oleh LMDH Wono Lestari setelah mendapat SK Perhutanan Sosial pada tahun 2017.⁴¹ SK yang diberikan kepada masyarakat lokal dengan skema perhutanan sosial dengan pola

⁴⁰ Perhutani, Kabupaten Lumajang Jadi Pilot Project Pengembangan Hutan Sosial” 2021, <https://www.perhutani.co.id/kabupaten-lumajang-jadi-pilot-project-pengembangan-hutan-sosial/> diakses pada tanggal 8 April 2024.

⁴¹ Wawancara dengan Ketua LMDH Wono Lestari, 6 April 2024.

kemitraan kehutanan antara masyarakat pemegang SK dengan Perhutani dalam hal ini pada kawasan BKPH Senduro/KPH Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan LMDH Wono Lestari membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan tujuan pemanfaatan dan pengelolaan hutan agar lebih fokus dibidangnya masing-masing. Menurut Bapak Siswanto selaku ketua LMDH Wono Lestari, terdapat beberapa KUPS mulai dari KUPS HMT, KUPS Sapi Perah, KUPS Wisata dll. KUPS yang dikembangkan di LMDH Wono Lestari ini termasuk dalam kategori platinum karena produk dari hasil pemanfaatan hutan ini sudah dipasarkan dan dipromosikan secara luas di tingkat nasional bahkan internasional

Aktor pemberdayaan yang berperan dalam sub bab kajian teori ini yaitu seluruh pihak terkait mulai dari pihak Perum Perhutani BKPH Senduro, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Hal ini disebabkan proses pelaksanaan di lapangan yang berada di Desa Burno tidak bisa dijalankan sendirian, Perum Perhutani selaku pihak pemberdaya mengajak dan melibatkan masyarakat yang diberdayakan yang dinaungi Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk bermitra agar pelaksanaan program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial ini bisa berjalan dengan baik.

Masyarakat sekitar hutan berada di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Masyarakat sekitar hutan di

nahkodai langsung oleh Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan Wono Lestari yang diketuai oleh Bapak Siswanto, sehingga hal ini menjadikan Bapak Siswanto beserta Ketua KUPS yang terdapat di pengurusannya menjadi pemeran utama sekaligus aktor pemberdayaan yang mewakili dari masyarakat sekitar hutan.

Tabel 2.2
Pengajian skema perhutanan sosial

KATEGORI (PS)	LOKASI	BENTUK HAK IZIN	PEMBERI HAK IZIN	PEMOHON
Hutan Adat (HA)	Wilayah adat	Hutan Hak	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masyarakat adat
Hutan Desa (HD)	Hutan Produksi & Hutan Lindung	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur	Koperasi Desa/BUMDES
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Produksi & Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemitraan (IUPHKm)	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur	Kelompok Masyarakat
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur	Perseorangan/ Kelompok
Kemitraan Kehutanan	Hutan Produksi, Hutan Lindung & Hutan Konservasi	Kesepakatan	Perum Perhutani	Masyarakat setempat/Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Sumber : Panduan Pengajian Perhutanan Sosial (KLHK)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengamati dan pengumpulan data dilakukan dengan latar alamiah, dalam artian tanpa manipulasi subjek yang diteliti.⁴² Van Maanen mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan disamping itu bisa memahami makna dari berbagai fenomena secara alamiah atau sosial.⁴³ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian jenis deskriptif. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terperinci tentang keadaan sosial yang rumit dan keterkaitannya dengan memanfaatkan metodologi kualitatif, memahami interaksi dalam konteks sosial yang rumit ini untuk mengidentifikasi pola-pola keterkaitan dan hipotesis yang pada akhirnya dapat dibangun menjadi teori.⁴⁴ Peneliti kemudian menggali lebih dalam untuk mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

⁴² Syalim & syahrums, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” ,(Cipustaka media bandung 2012),hlm 47.

⁴³ St. Suwarsono, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2016), hlm 1.

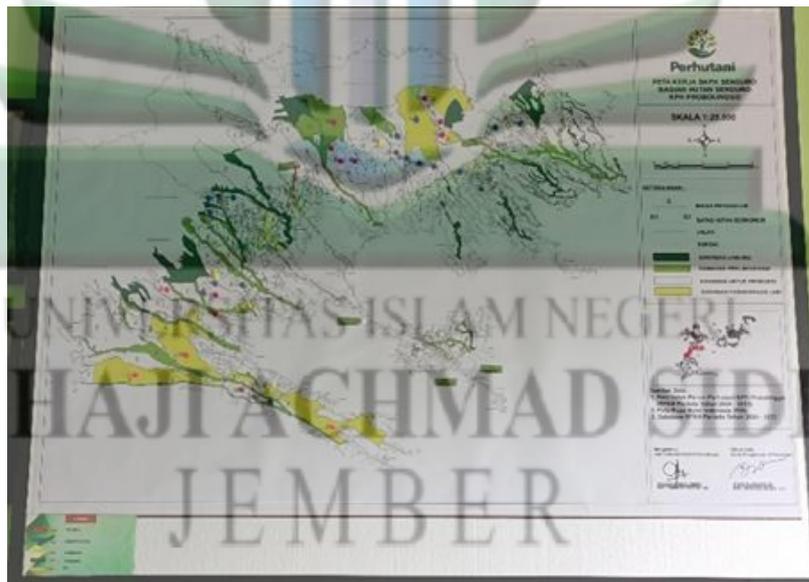
⁴⁴ Roimanson Panjaitan, “*Metodologi Penelitian*”, (Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017), 56.

B. Lokasi Penelitian

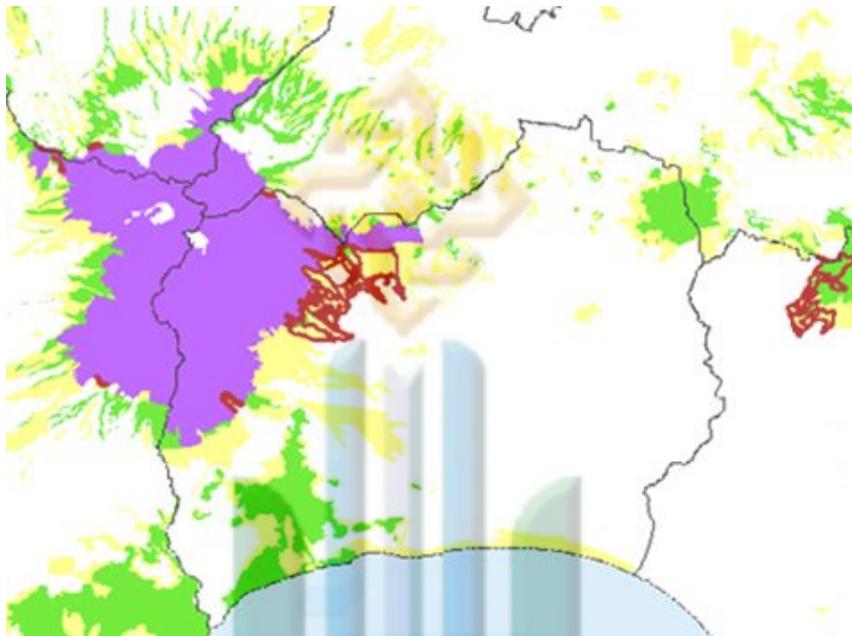
Peneliti memilih BKPH Senduro dengan sebagian wilayah hutannya yang berada di kawasan Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu desa yang terdapat disekitar kawasan hutan dan tmengusung praktik program Perhutanan Sosial oleh Perum Perhutani BKPH Senduro. Secara spesifik Desa Burno berbatasan langsung dengan Kecamatan Pasrujambe sebelah selatan, Desa Senduro sebelah timur, Desa Kandang Tepus sebelah utara, dan wilayah Hutan Perhutani (Hutan Negara) sebelah barat.

Peneliti pada observasi awal menemukan data yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga kemudian peneliti mengumpulkan informasi data yang ada dilapangan sebagaimana adanya fenomena Perhutanan Sosial oleh BKPH Senduro dan dilakukan oleh masyarakat Desa Burno. Hal ini yang nantinya akan membantu penulis dalam mendukung temuan data dilapangan saat proses penelitian sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mencakup melalui wawancara dan observasi, maka penentuan tempat penelitian sangat penting untuk keberhasilan dalam menemukan data penelitian. Pertama, latar BKPH Senduro ini sangat cocok untuk digunakan dalam kegiatan pemberdayaan karena melibatkan sebagian besar masyarakat terutama yang hidup di sekitar hutan. Kedua, lokasi ini sangat sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan, yang diibuktikan dengan observasi awal. Ketiga, lokasi ini dapat membantu untuk menemukan fokus penelitian seperti, apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana proses dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, serta bagaimana

hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hasilnya dengan menggunakan teknik tersebut, masyarakat sekitar hutan yang terdapat di Desa Burno Kecamatan Senduro bisa terlibat dalam pelaksanaan skema perhutanan sosial. Alasan lain dari peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan Kabupaten Lumajang tepatnya Kecamatan Senduro memiliki kekayaan disektor kehutanan yang patut dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, sehingga perlu dimaksimalkan lebih dalam terutama skema perhutanan sosial yang sudah diatur melalui PERMEN LHK



Gambar 3.1
Peta BKP-H Senduro



Gambar 3.2
Peta Persebaran Kemitraan Kehutanan di Kab. Lumajang

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini peneliti menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah “*purposive*”, maksudnya peneliti memilih informan yang dianggap paling memahami dalam masalah yang akan dikaji oleh peneliti dan mengetahui data-data yang di perlukan oleh peneliti.⁴⁵ Berikut beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan dalam penelitian ini.

1. Informan mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan jumlah 4 informan.

⁴⁵ Dr. H. Mundir, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm 43-44.

2. Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya terutama dalam sifat alamiah dan maknanya, dengan jumlah 4 informan.
3. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian ini, dengan jumlah 4 informan.
4. Bersedia untuk diwawancarai dan direkam aktifitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung, dengan jumlah 4 informan.
5. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dengan jumlah 4 informan.

Adapun subjek penelitian ditentukan oleh peneliti yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu agar data yang didapatkan bersifat faktual, sebagai berikut :

1. Asisten Perhutani (ASPER)

ASPER merupakan jabatan tertinggi di lingkup Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH). Bapak Gatot Kuswinaryono selaku kepala BKPH Senduro yang dipilih menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Apabila peneliti akan melakukan wawancara dan observasi beliau menjadi orang yang paling mengerti dan paham, hal ini dikarenakan beliau memiliki data-data yang terkait sekaligus kapasitas dalam lingkup kawasan hutan di BKPH Senduro yang terbagi di 4 Resort Pengelolaan Hutan (RPH), yaitu RPH Senduro, RPH Ranupane, RPH Besuksat dan RPH Gucalit.

2. Mantri (KRPH)

Mantri merupakan kepala dari Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Bapak Deni Indra Kesuma selaku KRPH Senduro juga menjadi salah satu informan terpenting dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan beliau termasuk orang lapangan yang memiliki tugas menjaga sekaligus menjalankan setiap program dari ASPER/KBKPH. Dalam menjalankan tugas di kawasan hutan, Mantri RPH Senduro didampingi oleh para Mandor lapangan yang tugasnya membantu tugas dari Mantri.

Peneliti mewawancarai Bapak Deni Indra Kesuma selaku Mantri/KRPH dan Bapak Sutari selaku Mandor yang mendapat tugas di Desa Burno. Hal ini dikarenakan sesuai dengan lokasi penelitian.

Tabel 3.1
Struktur Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Senduro

NO.	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1.	Deni Indra Kesuma	Mantri	Laki-laki
2.	Asmad	Mandor	Laki-laki
3.	Sukur	Mandor	Laki-laki
4.	Sutari	Mandor	Laki-laki
5.	Slamet	Mandor	Laki-laki
6.	Yulianto	Mandor	Laki-laki

Sumber : Hasil diskusi dengan KRPH Senduro

3. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

LMDH merupakan mitra Perhutani yang bekerja sama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Desa Burno memiliki LMDH Wono Lestari yang sudah ber-KULIN KK sehingga bisa menjalankan dan melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan skema perhutanan sosial. LMDH ini diketuai oleh Bapak Siswanto, beliau sangat antusias terhadap

program perhutanan sosial yang dicanangkan dan dijalankan oleh Perhutani, hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terutama di Desa Burno Kecamatan Senduro.

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti mewawancarai Ketua LMDH sekaligus wakilnya yakni Bapak Siswanto dan Bapak Hendro. Hal ini dikarenakan hanya beliau yang berkenan dalam penggalian data ini.

Tabel 3.2
Struktur Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari

NO	NAMA	STRUKTUR	JENIS KELAMIN
1.	Siswanto	Ketua	Laki-laki
2.	Hendro	Wakil Ketua	Laki-laki
3.	Andrian	Sekretaris	Laki-laki
4.	Mail	Bendahara	Laki-laki

Sumber : Hasil diskusi dengan Ketua LMDH Wono Lestari

4. Masyarakat setempat (Bapak Sumali dan Bapak Bambang)

Peneliti pengambil subjek dari masyarakat setempat yaitu Bapak Sumali, hal ini dikarenakan beliau merupakan peternak sapi perah sekaligus anggota dari LMDH Wono Lestari yang bisa memberikan informasi terkait dijalankannya skema perhutanan sosial terutama dari sisi dampak yang ditimbulkan. Bapak Sumali merupakan orang asli setempat yang notabene sangat paham akan seluk-beluk dari permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kawasan hutan di Desa Burno. Subjek berikutnya yang diambil oleh peneliti sebagai masyarakat sekitar hutan yaitu Bapak Bambang. Hal ini dikarenakan beliau orang asli setempat dan merupakan anggota dari LMDH Wono Lestari yang sudah berjibaku di kawasan hutan

sejak kecil, sehingga dapat dijadikan informan dalam pengambilan data berdasarkan faktual.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan usaha peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa tehnik yang akan dilakukan, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan langsung untuk mengamati sasaran penelitian dan merekam perilaku peristiwa secara asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam waktu tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan rinci. Peneliti menggunakan metode ini agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengamatan secara langsung, bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan percakapan langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti, wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan

⁴⁶ Sirajuddin Shaleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Pustaka Ramadhan Bandung 2017), hlm 65.

dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti semi terstruktur dengan urutan pertanyaan yang diajukan lebih bersifat fleksibel dan mengalir begitu saja, setelah peneliti memperoleh informasi maka peneliti mengadakan wawancara yang lebih terstruktur berdasarkan apa yang disampaikan informan tersebut.⁴⁷ Artinya urutan dari butir pertanyaan yang akan diajukan peneliti terhadap informan tidak wajib sama dengan urutan yang telah dipersiapkan namun setiap pertanyaan yang disampaikan masih sesuai dengan tema penelitian yang diangkat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk upaya pengumpulan data dengan mengumpulkan benda-benda tertulis yang dijadikan sebagai pelengkap data yang akan dicantumkan dalam hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁴⁸ Adapun data-data yang peneliti kumpulkan berupa dokumentasi terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno ini berlangsung, sekaligus dokumentasi wawancara bersama informan serta dokumen lain yang dapat memperkuat hasil penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dikerjakan, menjadi satu hal yang sangat penting yang tidak dapat dilewatkan.

⁴⁷ Sirajuddin Shaleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Pustaka Ramadhan Bandung 2017), hlm 61-62.

⁴⁸ Dr. H. Mundir, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm186.

Hasil dari analisis data dikumpulkan oleh peneliti untuk dijabarkan dalam hasil karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono menjelaskan bahwasanya proses analisis data dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan secara terus menerus hingga selesai sampai akhir.⁴⁹ Adapun proses dalam menganalisis data berdasarkan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu kegiatan merangkum data yang didapatkan dengan diperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi bagian terpenting.⁵⁰ Berdasarkan proses reduksi data maka peneliti bisa menjabarkan data secara lebih rinci sehingga mampu memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Menyajikan data merupakan upaya melakukan mendisplay data yang telah didapatkan dengan melakukan penguraian secara singkat, mencari hubungan antar kategori sehingga mampu memudahkan peneliti dalam hal memahami terkait suatu permasalahan yang sedang terjadi dan dapat menentukan hal apa saja yang akan dilakukan selanjutnya.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 246.

⁵⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 247.

⁵¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 249.

3. Penarikan Kesimpulan

Menentukan suatu kesimpulan adalah upaya untuk menjelaskan data yang didapatkan serta bagaimana pemahaman peneliti terhadap data tersebut.⁵² Langkah yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dimana hasil kesimpulan yang diperoleh tentu harus bisa dipertanggungjawabkan faktanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan dalam hasil penelitian kualitatif. Moleong dalam Umar Sidiq menyebutkan bahwasanya apabila suatu data yang didapatkan peneliti agar dapat dipastikan kevalidannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan teknik keabsahan data ini.⁵³ Penerapan teknik keabsahan data ini dibagi menjadi dua jenis teknik yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu suatu teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan mempergunakan tehknik yang sama, namun dilakukan terhadap beberapa subyek yang berbeda.⁵⁴

Senada dengan apa yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk mengetahui terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro peneliti

⁵² Umar Sidiq, *Metodologi Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 50

⁵³ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 194.

⁵⁴ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 195.

tidak hanya menjadikan ASPER/KBKPH sebagai subjek penelitian, namun peneliti juga memilih pihak lain yang dapat dijadikan sebagai informan seperti Mantri/KRPH, Ketua LMDH dan masyarakat sekitar hutan

2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi teknik yaitu upaya mendapatkan data dengan menggunakan teknik yang sama pada subyek yang sama pula.⁵⁵ Peneliti melakukan perbandingan antara data yang didapatkan melalui teknik observasi (pengamatan), wawancara secara langsung, dan didukung dengan dokumentasi sehingga data yang didapatkan tidak menimbulkan perspektif yang menimbulkan keraguan kebenarannya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan ini peneliti mencoba menyusun beberapa perencanaan yang akan dilakukan dimulai dari kegiatan persiapan sampai dengan penyusunan laporan yang telah didapatkan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.⁵⁶

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang pertama ini peneliti melakukan penentuan mengenai lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, mengidentifikasi masalah yang akan dikaji, menyusun fokus penelitian, melakukan studi literatur sebagai informasi tambahan pemahaman mengenai permasalahan yang akan dikaji, serta mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan pada saat dilapangan seperti pertanyaan wawancara. Peneliti juga melakukan

⁵⁵ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 194.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas, 2020), hlm 48.

konsultasi dan pengajuan proposal penelitian dan juga mengurus perizinan penelitian yang akan dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap yang kedua ini peneliti melakukan kunjungan terhadap lokasi yang dipilih secara langsung, hal ini dilakukan agar peneliti bisa memahami hal apa saja yang harus dilakukan serta subjek siapa saja yang layak untuk dijadikan sebagai informan sehingga hal ini diharapkan dapat memudahkan peneliti saat melakukan interaksi dengan para informan ataupun saat melakukan penggalan data melalui wawancara, observasi, dan disertai dengan dokumentasi.

3. Tahap Penyelesaian

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahap penyelesaian, dimana dalam tahapan ini peneliti harus mulai menyajikan data serta melakukan penyusunan laporan dan memvalidkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Perum Perhutani BKPH Senduro yang terletak di Sumberrejo, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Adapun hasil dari proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Profil Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Senduro

Perum Perhutani BKPH Senduro merupakan salah satu bagian dari unit operasional Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo dan unit pemerintahan **Divisi** Regional (Divre) Jawa Timur dengan luas kawasan mencapai 8.697,7 Hektar yang termasuk di kawasan hutan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kawasan hutan BKPH Senduro mencakup beberapa Kecamatan yang berada di wilayah barat laut Kabupaten Lumajang yaitu Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit. Terbagi menjadi 4 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Senduro, RPH Ranupane, RPH Gucialit dan RPH Besuk Sat. berada di ketinggian 600-1000 mdpl, kawasan BKPH Senduro termasuk bagian hutan yang terdapat unit usaha yaitu Kelas Perusahaan (KP) damar dan jati, sehingga tak heran banyak dijumpai pohon damar dan jati di kawasan hutan yang berada di wilayah ini. Diapit oleh dua gunung aktif yaitu Gunung Semeru dan Gunung Bromo serta berbatasan dengan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru

menjadikan kawasan hutan BKPH Senduro memiliki berbagai potensi yang patut untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan letak geografisnya wilayah BKPH Senduro sebagian besar termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo. Daerah Aliran Sungai (DAS) ini mengalir dari barat ke tenggara yang melewati kawasan hutan BKPH Klakah, BKPH Pasirian, BKPH Senduro dan BKPH Pronojiwo yang semua kawasan hutan ini berada di wilayah Kabupaten Lumajang.

Adapun batas-batas BKPH Senduro antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan BKPH Sukapura
- Sebelah barat berbatasan dengan KPH Malang
- Sebelah timur berbatasan dengan BKPH Pasirian
- Sebelah selatan berbatasan dengan BKPH Pasirian dan BKPH

Pronojiwo

2. Profil Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Desa Burno merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Berada di sebelah timur laut Gunung Semeru menjadikan Desa ini memiliki potensi di berbagai sektor seperti perkebunan dan peternakan. Sektor perkebunan yang menjadi unggulan yaitu perkebunan pisang mas kirana (jenis **pisang** asli Kabupaten Lumajang), kopi, dan kapulaga. Sedangkan disektor peternakan terdapat peternakan sapi perah dan kambing etawa (kambing ras senduro) yang memiliki peran besar di tingkat kesejahteraan masyarakat

Desa burno terutama di sektor ekonomi. Desa Burno juga berbatasan langsung dengan lahan milik Perum Perhutani BKPH Senduro sehingga sebagian masyarakat sekitar hutan turut andil dan berperan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan berdasarkan skema perhutanan sosial.

a. Letak geografis dan karakteristik masyarakat Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Desa Burno terletak di lereng sebelah timur laut Gunung Semeru yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru Kabupaten Lumajang. Berjarak sekitar 22 km dari Ibukota Kabupaten Lumajang. Memiliki luas 40,72 km dengan rincian lahan pertanian seluas 594,36 ha, lahan pekarangan dan bangunan seluas 243,26 ha, dan lahan lainnya seluas 3234,8 ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro
- Sebelah barat berbatasan dengan lahan Perum Perhutani dan TNBTS
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Senduro Kecamatan Senduro
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe

Desa Burno memiliki 6 Dusun yaitu dusun Krajan I, Krajan II, Tugu, Mlaming, Karanganyar dan Gondang



Gambar 4.1
Peta Desa Burno

- b. Aspek demografis Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Jumlah penduduk Desa Burno yaitu 4975 jiwa (2022) yang terbagi di 6 Dusun, 34 RT dan 6 RW, dengan rincian 2547 laki-laki dan 2428 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 122 jiwa/km².

- 1) Klasifikasi Penduduk Desa Burno berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Burno

NO	JUMLAH	
1	Jenis Kelamin Laki-laki	2547 Jiwa
2	Jenis Kelamin Perempuan	2428 Jiwa
3	Total	4975 Jiwa

Sumber : Website Desa Burno Kecamatan Senduro

- 2) Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Burno

Berdasarkan sesuai letaknya yang berada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bromo-

Tengger-Semeru Desa Burno memiliki kondisi yang berbeda dari desa pada umumnya, hal ini bisa dilihat dari kondisi sosial dan budaya. Desa Burno didominasi oleh masyarakat suku Jawa yang mayoritas beragama Islam. Namun, di Desa Burno terdapat pula masyarakat suku Tengger sub-suku Jawa yang memeluk agama Hindu. Hal ini dikarenakan tak jauh dari Desa ini sekitar 4 km tepatnya di Desa Senduro terdapat tempat sembahyang/ibadah masyarakat Hindu yaitu Pura Mandara Giri Semeru Agung yang merupakan Pura terbesar di Kabupaten Lumajang. Pura ini juga merupakan tempat yang sangat disucikan oleh masyarakat setempat terutama masyarakat Hindu yang berasal dari Pulau Bali.

Terdapat pula sebagian masyarakat suku Tengger hal ini disebabkan letak Desa Burno bersebelahan dengan Desa Ranupani yang merupakan desa di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru yang didominasi oleh masyarakat suku Tengger, meskipun kedua desa ini bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh kawasan hutan konservasi yang sangat lebat, namun jarak kedua desa ini bisa dibilang sangat jauh yaitu sekitar 22 km.

Sektor perekonomian masyarakat Desa Burno, rata-rata masyarakatnya memiliki ketergantungan yang besar terhadap hutan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Desa Burno yang beternak sapi perah dan kambing etawa yang merupakan kambing ras Senduro, dalam beternak sapi perah dan kambing etawa,

masyarakat Desa Burno memanfaatkan lahan milik Perum Perhutani yang berada di pemangkuan BKPH Senduro – KPH Probolinggo dengan cara skema kemitraan kehutanan. Masyarakat menanam hijauan makan ternak (HMT) ditengah tegakan pohon-pohon damar seperti rumput gajah, daun kaliandra, dll.

Desa Burno yang didiami 1.650 Kepala Keluarga (KK) memang sangat unik. Selain letaknya di pinggir kawasan hutan, di desa ini juga terdapat populasi 1.300 ekor sapi perah. Dari 6 dusun, Dusun Karanganyar menyumbang populasi sapi perah terbanyak dengan berpenduduk 275 KK, jumlah sapi di Dusun Karanganyar yaitu 912 ekor dengan produksi susu mencapai 5.800 liter per hari.⁵⁷ Proses pemerah susu yang dilakukan masyarakat Desa Burno yaitu dengan melakukan pemerahan secara dua kali dalam sehari yakni setiap pagi dan sore. Umumnya setiap ekor sapi dapat menghasilkan 10-15 liter per harinya, setelah proses pemerahan kemudian susu diletakkan di wadah (*milkcan*) yang selanjutnya akan dibawa ke *colling unit* untuk disetorkan ke KUD yang nantinya akan diekspor ke luar kota, bahkan sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan susu terbesar yaitu Netsle.

Peternakan kambing etawa telah berkembang sangat pesat dan menjadi ikon asli dari peternakan kambing ras asli senduro. Kambing Senduro merupakan keturunan yang diduga

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Eko Masyarakat Desa Burno, 24 Mei 2024

berasal dari hasil persilangan antara kambing Etawa, Kacang, dan Jawarandu yang sudah berlangsung sejak 100 tahun lamanya.⁵⁸ Pemanfaatan kambing etawa yang dilakukan masyarakat ini dengan cara mengimplementasikan sesuai jenisnya, karena kambing etawa selain bisa di perah masyarakat Desa Burno menjadikan kambing ini sebagai pedaging. Proses pemerahan kambing ini mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Kambing jenis ini banyak dimanfaatkan untuk produksi olahan-olahan susu yang dipercaya mempunyai kandungan manfaat bagi kesehatan. Jenis pedaging masyarakat Desa Burno memanfaatkan kambing jenis ini untuk pedaging. Bobot dari kambing jenis etawa bisa mencapai 120 kg untuk pejantan, dan 90 kg untuk betina, sedangkan untuk postur pejantan bisa mencapai 125 cm, ini yang menjadi penyebab daging dari jenis kambing ini unggulan atau grade A.

3. Sejarah Singkat Perhutanan Sosial

Skema perhutanan sosial pada awalnya merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dan ketimpangan di lingkup hutan. Era periode order baru hutan hutan di Indonesia dominan dikuasai dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang memegang konsesi, berbanding terbalik dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sering kali tidak memiliki hak layak atas pemanfaatan hutan maupun akses hutan yang memadai. Era reformasi

⁵⁸ Rizka Gitta Almaida, Yudit Oktanella, Gatot Ciptadi, *Variasi Genetik Kambing Senduro dan Peranakan Etawa (PE) Berdasarkan Sekuen Gen Cyt-B (Cytochromeb) Dengan Metode Polymerase Chain Reaction*, Journal of Tropical Animal Production, Vol. 21, No. 2, 2020.

tahun 1990-an memiliki dampak yang luar biasa dikarenakan terbukanya ruang untuk masyarakat setempat (adat/lokal) untuk turut serta memanfaatkan hutan secara efektif, sedangkan era reformasi hingga sekarang membawa terdapat berbagai perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia melalui berbagai terobosan, yakni pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal atas pengelolaan hutan. Program ini memunculkan berbagai skema perhutanan sosial yang memberikan kesempatan untuk agar masyarakat terlibat aktif dalam konservasi hutan serta mendapatkan dampak positif manfaat ekonomi dari sumber daya hutan secara legal, sehingga menciptakan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan sosial.

Implementasi skema perhutanan sosial mulai lebih terfokuskan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal dan pengelolaan hutan secara lestari. Keputusan ini resmi tertuang melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, melindungi sumber daya hutan secara berkelanjutan. Sejak saat itu hingga sekarang, program perhutanan sosial semakin dikembangkan sebagai bagian daripada kebijakan nasional. Adapun skema-skema perhutanan sosial yang sudah diimplementasikan hingga saat ini yaitu, Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan.

Kabupaten Lumajang yang wilayah hutannya dikelola oleh Perum Perhutani Senduro yang meliputi 3 kecamatan yakni hutan di Kecamatan Senduro, Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Pasrujmbé mengimplementasikan skema perhutanan sosial yaitu Kemitraan Kehutanan yang mana masyarakat mendapat hak kelola atas izin pemanfaatan hutan melalui kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menjadi naungan organisasi dari masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan. Desa Burno Kecamatan Senduro memiliki LMDH Wono Lestari yang bermitra dengan Perum Perhutani BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial kemitraan kehutanan per tahun 2017 hingga sekarang. Memiliki luas kawasan hutan sekitar 940 hektar, LMDH Wono Lestari mendapat amanah atas izin pemanfaatan hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan tujuan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dapat menciptakan nilai ekonomis bagi masyarakat. Dampak dari penerapan skema ini, masyarakat setempat yang terdapat di Desa Burno akhirnya mendapatkan berbagai keuntungan seperti meningkatnya jumlah sapi perah yang dipelihara oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mata pencaharian sebagian masyarakat yang terdapat di sekitar kawasan hutan yakni peternak sapi perah, keuntungan berlipat ganda digapai para peternak sebab masyarakat yang menjadi peternak tidak sulit mencari pakan ternak dikarenakan adanya skema kemitraan kehutanan yang memberikan akses masyarakat dengan

bercocok tanam tanaman rumput gajah melalui teknik tumpang sari pada tegakan pohon utama yakni pohon damar. Dampak positif yang diperoleh masyarakat yakni adanya obyek wisata pada kawasan hutan dan masyarakat lokal diberi keleluasaan dalam pengelolaan kawasan wisata ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat yang menjadi pelaku dalam pengelolaan kawasan ini

Berikut profil LMDH Wono Lestari :

Ketua : Siswanto

Wakil : Hendro

Tahun berdiri : 2006 (Bermitra dengan Perhutani sejak 2017)

Luas hutan : 940 hektare

Desa : Burno

KUPS : HMT (Hijauan Makan Ternak), Wisata.

B. Penyajian Data dan Analisis

Bab ini peneliti akan menjelaskan sekaligus menguraikan hasil data pada penelitian yang telah dirumuskan pada bab satu, bahwasanya kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lumajang tepatnya pemangkuan Perhutani BKPH Senduro memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang patut untuk diulas. Temuan berbagai data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Proses penggalian data pada saat penelitian yang dilakukan pertama kali oleh peneliti yaitu datang ke kantor Perum Perhutani BKPH Senduro yang beralamat di Sumberrejo, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten

Lumajang. Tujuan peneliti yaitu izin melakukan penelitian kepada Asper Perhutani BKPH Senduro sekaligus wawancara ke berbagai narasumber dalam penggalan data mengenai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Adapun beberapa narasumber yang dijadikan obyek penelitian yaitu Bapak Gatot Kuswaryono selaku Asper BKPH Senduro, Bapak Deni Indra Kusuma selaku KRPH Senduro, dan beberapa narasumber lainnya.

Penyajian data ini merujuk pada fokus penelitian, peneliti dapat menjabarkan semua temuan yang sudah diteliti diantaranya :

- 1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.**

Perum Perhutani BKPH Senduro memiliki peran sangat vital dalam proses pemberdayaan salah satunya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan tentunya program berunsur pemberdayaan masyarakat yang berbasis hutan lestari. Adapun yang dimaksud disini dalam hutan lestari yaitu pengelolaan hutan yang memiliki prinsip keberlanjutan, dimana praktik pengelolaannya bertujuan untuk mempertahankan nilai ekologi dari hutan dan nilai ekonomi dari hutan. Pengelolaan berbasis hutan lestari memiliki nilai ekologi yaitu mencakup pemanfaatan hutan dengan tidak merusaknya dan menjaga keanekaragaman

hayati, sedangkan nilai ekonomi dari hutan yaitu turut melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaannya, hal ini bertujuan untuk mengangkat nilai ekonomis sekaligus meningkatkan roda perputaran ekonomi yang ada pada masyarakat sekitar hutan.

Peneliti melakukan penggalian data di Kantor Perum Perhutani BKPH Senduro, peneliti berkesempatan wawancara dengan Asper BKPH Senduro yaitu Bapak Gatot Kuswinaryono tentang skema perhutanan sosial yang sudah dijalankan di wilayah hutan pemangkuan BKPH Senduro salah satunya Desa Burno Kecamatan Senduro yang menjadi wilayah dari Resort Pemangkuan Hutan Senduro. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gatot Kuswinaryono.⁵⁹

“skema yang dijalankan di Desa Burno yakni kemitraan kehutanan, kami bermitra dengan LMDH Wono Lestari atas pemanfaatan hutan”.

Peneliti juga berkesempatan untuk menemui KRPH Senduro/Mantri RPH Senduro yaitu bapak Deni Indra Kusuma, yang mana lokasi penelitian dari peneliti ini yakni Desa Burno ini menjadi kawasan kerja dari bapak Deni Indra Kusuma. Peneliti juga berkesempatan untuk wawancara mengenai skema perhutanan sosial yang sudah berjalan di wilayah dari Resort Pemangkuan Hutan Senduro. Berikut pemaparannya.⁶⁰

“alhamdulillah sampai saat ini berjalan baik baik saja skema perhutanan sosial ini, doakan berjalan baik sampai regulasi berikutnya.”

⁵⁹ Gatot Kuswinaryono, Wawancara, BKPH Senduro 27 Mei 2024

⁶⁰ Deni Indra Kusuma, Wawancara, RPH Senduro 27 Mei 2024

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang terdapat di Desa Burno dinaungi oleh suatu lembaga yang bermitra langsung dengan Perum Perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 telah ditetapkan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Wono Lestari dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo yang masuk dipangkuan BKPH Senduro dengan luas 940 hektar. Desa Burno sendiri memiliki memkawasan hutan didominasi oleh tegakan pohon damar dengan tanaman penyanggah yang salah satunya yaitu rumput gajah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan. Kawasan tegakan pohon damar yang sangat rindang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dinahkodai oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata, yaitu Wana Wisata Siti Sundari. Wana wisata ini berdiri pada tahun 2017 dengan keluasan pemanfaatan kawasan sekitar 9,4 hektar. Didirikan oleh beberapa komunitas yaitu Downhill, Trail, Jeep, Raja Giri/Pecinta Alam, Spot Bunga, dan Jaga Wana/Outbound. Kisaran tahun 2017-2020 wana wisata ini sempat menjadi tempat wisata paling viral di Kabupaten Lumajang. Namun, datangnya *Covid-19* yang melanda seluruh penjuru dunia menjadi pemicu awal mundurnya kawasan wana wisata ini, dibawah tegakkan pohon pula masyarakat sekitar hutan yang ada di Desa Burno tercetuskan

ide untuk ditanami rumput gajah dibawah tegakan. Hal ini terus dikelola lebih lanjut oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Hijauan Makan Ternak (HMT). HMT sendiri merupakan pakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang diberikan pada ternak dalam bentuk segar maupun layu seperti rumput gajah, dan dedaunan jenis kaliandra. Perhutani juga menyediakan lahan untuk masyarakat sekitar hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial. Buah hasil dari HMT ini banyak potensi yang mulai dikembangkan oleh masyarakat sekitar hutan salah satunya produksi susu sapi perah, yang dalam per harinya susu di Desa Burno pernah menyentuh angka 6000 liter per hari, ini merupakan angka yang sangat fantastis untuk suatu kelompok usaha yang bermitra dengan Perhutani. Setiap harinya, dalam proses pemerahan setiap ekor sapi bisa menghasikan sekitar 10-15 liter per hari dalam dua kali perah, yaitu pagi dan sore. Faktor tersebut yang menjadi alasan banyak perusahaan besar yang sudah terlibat dalam perputaran ekonomi di bidang susu sapi ini, diantaranya Netsle, Frisian Flag dan lainnya.

Potensi-potensi inilah yang perlu dimanfaatkan oleh BKPH Senduro dengan mitranya LMDH Wono Lestari agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. BPKH Senduro terus mengembangkan sekaligus mengupayakan skema kemitraan kehutanan ini dengan LMDH Wono Lestari yang menjadi satu-satunya lembaga masyarakat yang berada dibawah naungan pemerintah Desa Burno yang fokus di bidang kehutanan. BKPH Senduro juga senantiasa melakukan pendampingan terhadap

masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sekaligus menjaga kelestarian hutan di kawasan Perum Perhutani BKPH Senduro.

Terdapat berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan, yakni

a. Pemberdayaan sosial (Perhutani bekerjasama dengan LMDH)

Perhutanan sosial merupakan program dari pemerintah yang memiliki berbagai skema dalam pemanfaatan hutan, salah satunya yaitu skema kemitraan kehutanan dengan perlunya pelibatan masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lokal sehingga perlu adanya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hal ini dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo yang dalam hal ini dilakukan oleh BKPH Senduro selaku pemangku wilayah dari kawasan hutan negara ini. Perum Perhutani pastinya tidak dapat berjalan sendirian dalam menjalankan skema perhutanan sosial. Hal ini dikarenakan menurut aturan dan regulasi perhutanan sosial bahwasanya masyarakat setempat mendapat hak kelola kawasan hutan secara legal, maka dari itu Perum Perhutani BKPH Senduro mengadakan suatu kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat lokal yang dinaungi Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Pengimplementasian proses kemitraan ini masyarakat lokal di Desa Burno mendapat SK hak kelola kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Senduro yakni Pengakuan Perlindungan–Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK)

yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pengimplementasian bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPH Senduro ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dijelaskan di bab dua, yakni termasuk pada pemberdayaan sosial. Hal ini dikarenakan terdapat suatu kemitraan atau kerjasama dari Perum Perhutani BKPH Senduro dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari yang ada di Desa Burno Kecamatan Senduro.



Gambar 4.2

Dokumentasi BKPH Senduro dan LMDH di Kec. Senduro

b. Pemberdayaan Ekonomi (Pendampingan KUPS)

Kelompok usaha perhutanan sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. KUPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk-produk yang dihasilkan dari hutan untuk dipasarkan sekaligus dijual agar dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat disekitar hutan. KUPS berada

dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang didukung oleh pemerintah desa setempat dengan menyediakan berbagai akses.

Perhutani BKPH Senduro beberapa kali melakukan pendampingan sekaligus pelatihan kepada kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang ada di LMDH Wono Lestari, diantaranya KUPS HMT dan KUPS wisata. KUPS HMT merupakan suatu kelompok usaha yang berfokus pada hasil hutan berupa hijauan makan ternak yang berasal dari tanaman atau tumbuhan di kawasan Perhutani yang diberikan pada ternak dalam bentuk segar maupun layu seperti rumput gajah dan dedaunan jenis kaliandra, yang selanjutnya untuk dijadikan pakan hewan seperti sapi perah dan kambing yang populasinya sangat besar di Desa Burno Kecamatan Senduro. Pendampingan yang dilakukan biasanya pihak Perhutani yang diwakili oleh Mantri beserta Mandornya datang langsung ke LMDH untuk berdiskusi sekaligus bersosialisasi tentang pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, sedangkan untuk KUPS wisata yang ada di LMDH Wono Lestari yaitu Wana Wisata Siti Sundari. Berdiri pada tahun 2017 dengan keluasan sekitar 9,4 hektare yang membentang di area pohon damar. LMDH Wono Lestari dalam pembentukan Wana Wisata Siti Sundari tak bisa berjalan sendiri dan disupport oleh berbagai komunitas yaitu Downhill, Trail, Jeep, Raja Giri/Pecinta Alam, Spot Bunga, dan Jaga Wana/Outbound

Pengimplementasian bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPH Senduro ini pada penelitian ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dijelaskan di bab dua, yakni termasuk pada pemberdayaan ekonomi. Hal ini dikarenakan terdapat suatu pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan suatu pendapatan atau nilai ekonomis masyarakat dari pemanfaatan hutan.



Gambar 4.3
Pendampingan dan sosialisasi BKPH Senduro dengan LMDH Wono Lestari

c. Pemberdayaan Lingkungan (Pelatihan Sistem Tumpang Sari)

Merujuk pada mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Burno yaitu peternak sapi perah, sehingga muncul terobosan baru dari Perum Perhutani BKPH Senduro dengan masyarakat Desa Burno yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan agar diciptakan suatu teknik menanam tumpang sari pada pohon tegakan. Kawasan hutan di Desa Burno umumnya terdiri dari tegakan pohon damar yang juga dapat dimanfaatkan getahnya oleh masyarakat setempat, akan tetapi yang difokuskan dari Perum Perhutani BKPH Senduro dan LMDH Wono Lesari yaitu hasil dari penanaman tanaman di tegakan pohon damar. Jenis tegakan yang di tanam pada teknik tumpang sari

yaitu rumput gajah yang memiliki peran penting dalam mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Burno yaitu peternak sapi perah.⁶¹ Buah hasil dari teknik ini, masyarakat Desa Burno tidak kesulitan dalam mencari pakan ternak dikarenakan rumput gajah yang sudah ditanam di tegakan pohon damar sudah di kelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berada dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari.

Perum Perhutani BKPH Senduro dan LMDH Wono Lestari dalam pelaksanaannya bisa dibilang saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan Perum Perhutani BKPH Senduro yang diamanahkan oleh Negara dalam menjaga sekaligus mengelola hutan memberikan petak lahan kepada masyarakat yang tergabung dalam LMDH untuk digarap dan dimanfaatkan secara penuh dengan perjanjian masyarakat hanya mendapatkan hak kelola bukan hak milik. Masyarakat diharuskan memberikan *sharing* atau imbalan kepada Perum Perhutani selaku pemilik lahan sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

Adapun perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, masyarakat/penggarap diharuskan menyetor uang sejumlah Rp. 90.000,00/tahun kepada Perum Perhutani. Besaran ini bisa dikatakan sangat kecil mengingat penggarap menyetorkan

⁶¹ Sahuri, Wawancara Burno, 12.12 WIB tanggal 12 September 2024

hasil hutan dalam setiap tahunnya, dalam $\frac{1}{4}$ hektarnya masyarakat bisa menghasilkan sekitar 10 ikat, dengan 1 ikatnya apabila dijual atau diuangkan dalam kisaran Rp. 25.000,00-30.000,00 tergantung besar ukuran dari ikatnya.⁶²

Program ini sangat bermanfaat bagi peternak sehingga gizi dari sapi perah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Burno bisa terpenuhi. Terdapat juga masyarakat yang menjual per ikat nya kepada peternak yang tidak tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan, sehingga dapat meningkatkan pemasukkan serta meningkatkan nilai ekonomis dari hasil tanaman dibawah tegakan.

Pengimplementasian bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPH Senduro ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dijelaskan di bab dua, yakni termasuk pada pemberdayaan lingkungan. Hal ini dikarenakan terdapat suatu usaha dari Perum Perhutani BKPH Senduro dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari untuk menerapkan teknik bercocok tanam tumpang sari yang dimana selain tergolong pada pemberdayaan lingkungan, bentuk pemberdayaan ini juga tergolong pada pemberdayaan ekonomi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekonomis masyarakat dalam sektor ternak sapi perah.

⁶² Observasi, 12 September 2024



Gambar 4.4
Penanaman rumput gajah di Desa Burno

2. Proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani BKPH Senduro melalui berbagai tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal ini pastinya terdapat dua persiapan yang harus dilakukan Perum Perhutani BKPH Senduro. Pertama Perum Perhutani BKPH Senduro menyiapkan pelaku pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini banyak pelaku yang dilibatkan dalam proses pemberdayaan seperti Asper selaku pimpinan tertinggi di BKPH Senduro, Mantri/KRPH selaku Kepala Resort, dan Mandor. Semua stakeholder kehutanan yang ada pada BKPH Senduro terlibat sesuai porsinya masing-masing. Asper selaku pemegang jabatan tertinggi pastinya memiliki porsi atau jangkauan yang lebih luas hal ini dikarenakan beliau yang memiliki kebijakan sesuai arahan dari KPH

dalam menjalankan proses pemberdayaan. Mantri/KRPH, beliau menjalankan arahan dari Asper apa saja yang dibutuhkan dan dipersiapkan sesuai regulasi yang dijalankan. Mandor, dalam hal ini mandor memiliki peran membantu KRPH dalam mempersiapkan proses pemberdayaan. Kedua yang harus dipersiapkan yakni lapangan, dalam hal ini pada dasarnya dilakukan dan dijalankan secara individu maupun kelompok. Perum Perhutani BKPH Senduro menyiapkan lokasi sesuai arahan dari KPH dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan, seperti contohnya dalam hal ini Perum Perhutani mendapat perintah untuk menjadikan kawasan hutan yang berada di Desa Burno Kecamatan Senduro dijadikan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Tahap ini pula Perum Perhutani BKPH Senduro menjalin relasi dengan mitranya yaitu Lembaga Masyarakat Desa hutan

b. Tahap Pengkajian

Tahap yang kedua ini Perum Perhutani BKPH Senduro selaku pemberdaya masyarakat mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, dengan demikian program yang sudah dicanangkan akurat dan tidak salah sasaran. Penerapan proses “*Assessment*” ini, Asper Perum Perhutani BKPH Senduro didampingi oleh Mantri dan Mandor turut serta mengkaji dan mengidentifikasi langsung permasalahan di Desa Burno melalui “*Interview*” agar pemberdayaan

melalui skema perhutanan sosial ini bisa berdampak positif terhadap masyarakat setempat.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahap yang ketiga ini Perum Perhutani BKPH Senduro yang melibatkan masyarakat ikut serta berpikir untuk menciptakan suatu alternatif program kegiatan melalui cara riset dan diskusi. Riset dilakukan untuk mengetahui skema perhutanan apa yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setelah riset dilakukan, Perum Perhutani BKPH Senduro diskusi untuk membahas hasil riset lapangan serta membuat perencanaan program. Hal ini dilakukan agar nantinya skema perhutanan sosial dapat menjadi kegiatan yang paling berhasil dan efisien dalam memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat. Pengkajian yang matang pada tahap ini akan benar-benar memastikan bahwa program perhutanan sosial ini berjalan efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap keempat ini Perum Perhutani BKPH Senduro tidak melibatkan masyarakat dalam merumuskan program yang akan mereka gunakan dan terapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. BKPH Senduro selaku agen perubahan membantu memformalkan konsep-konsep mereka ke dalam bentuk tulisan, terutama dalam konteks pengajuan proposal kepada penyandang dana. Hal ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat memahami konsep

perhutanan sosial yang akan dijalankan dengan menggandeng berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar mendapatkan dana hibah atau bantuan dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat bahwasanya LMDH Wono Lestari di Desa Burno pernah mendapat bantuan dana dari Direktur Utama Perhutani. Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro menyerahkan bantuan senilai Rp60 juta kepada 3 (tiga) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Lumajang bersama Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rachman Ferry Isfiyanto dalam kunjungannya ke Wisata Siti Sundari di Desa Burno Kecamatan Senduro Lumajang Jawa Timur, ketiga LMDH penerima bantuan tersebut adalah LMDH Sukowono, LMDH Rimba Jaya, dan LMDH Wono Lestari.⁶³

e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Tahap yang kelima ini yaitu implementasi, Perum Perhutani BKPH Senduro menjalankan program perhutanan sosial yang sudah dicanangkan sebelumnya melalui berbagai bentuk pemberdayaan. Diantaranya pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. Perum Perhutani BKPH Senduro bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH) Wono Lestari selaku pemangku atau naungan dari masyarakat sekitar hutan agar dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan

⁶³ Perhutani.co.id, Potensi Hutan Perlu Pengembangan, Desa Burno Jadi Pilot Project Nasional, Suaramerdeka.com, Juny 10, 2019, <https://www.perhutani.co.id/en/potensi-hutan-perlu-pengembangan-desa-burno-jadi-pilot-project-nasional/>

melalui skema perhutanan sosial dapat menciptakan berbagai keuntungan yakni munculnya berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. KUPS ini menjadi ekonomi tambahan dari masyarakat setempat melalui berbagai kelompok-kelompok usaha yang dibentuk seperti KUPS HMT dan KUPS Wisata.

f. Tahap Evaluasi

Tahap yang keenam ini yaitu evaluasi, Perum Perhutani BKPH Senduro mengevaluasi jalannya program yang sudah diimplementasikan dengan melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari. Pembentukan LMDH Wono Lestari ini, Perum BKPH Senduro pastinya akan mengetahui berbagai kelebihan dan manfaat dari program-program yang sudah dijalankan. Tentunya dengan demikian dapat diketahui apa saja yang harus diperbaiki atau diperbarui agar bisa lebih baik kedepannya

g. Tahap Terminasi

Tahapan terakhir yaitu terminasi, Perum Perhutani BKPH Senduro tidak seutuhnya melakukan tahap terminasi karena proses pemberdayaan ini tidak dapat ditinggalkan, apabila Perum Perhutani BKPH Senduro melaksanakan tahap terminasi ini proses pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial ini akan berdampak dan berpengaruh pada lingkup kehutanan dikarenakan lapangan yang

dijadikan proses pemberdayaan oleh Perum Perhutani BKPH Senduro ini termasuk pada kawasan hutan Negara, pastinya akan banyak dan muncul berbagai efek yang ditimbulkan apabila Perum BKPH Senduro menerapkan tahap terminasi. Pasalnya penerepan di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani terdapat berbagai regulasi dalam pembentukan maupun menjalankan program. Akibat pada proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial akan tetap dijalankan dan akan mendapat pendampingan langsung dari Perum Perhutani BKPH Senduro sampai muncul regulasi baru.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Program perhutanan sosial bertujuan memberikan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan. Jalannya skema perhutanan sosial, pastinya akan muncul suatu hambatan dalam proses mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan luas kawasan hutan sekitar 940 hektare pastinya akan muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses skema perhutanan sosial.

Menurut penjabaran dari bab dua tentang penghambat pemberdayaan, faktanya di lapangan hanya terdapat dua faktor yang

menghambat jalannya skema perhutanan sosial yakni Adanya konflik dan Inovasi tidak berkembang yang menjadi hambatan implementasian di kawasan hutan Desa Burno yang masuk di kawasan hutan milik Perum Perhutani BKPH Senduro, adapun bentuk hambatannya sebagai berikut.

a. Adanya Konflik (Konflik Internal Lembaga)

Sebenarnya dengan adanya kelembagaan ini berdampak cukup baik dalam membantu proses skema perhutanan sosial, namun pastinya juga akan terdapat beberapa permasalahan atau hambatan bagi Perum Perhutani BKPH Senduro dalam melaksanakan skema perhutanan sosial di Desa Burno. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari ini dikatakan penghambat dalam proses skema perhutanan sosial yaitu kebijakan internal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa anggota, terdapat pula kesenjangan antara pengurus lama dengan pengurus yang baru sehingga sangat mempengaruhi skema perhutanan sosial ini.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan ketika proses wawancara dengan Bapak Siswanto selaku ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari yang baru dilantik yakni sebagai berikut:⁶⁴

“saya sebagai ketua yang baru tidak tahu-menahu apa saja permasalahan yang ditinggal oleh pengurus yang lama, mereka tidak ada interaksi sama sekali dengan saya, bahkan yang sampai sekarang saya kurang bisa menerima yaitu

⁶⁴ Siswanto, LMDH Wono Lestari 12.00 WIB tanggal 2 oktober 2024

pengurus yang lama masih mengakui bahwasanya mereka masih menjadi pengurus di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, diawal-awal hal ini sangat mengganggu dan bisa dikatakan lancung, tetapi lambat laun kalau kata orang jawa aku gak ngurus.”

Hal ini sangat mengganggu dan menghambat dimana internal di Lembaga yang menaungi masyarakat sekitar hutan di Desa Burno mengalami masalah klasik yakni perebutan jabatan. LMDH berada dibawah naungan Pemerintah Desa sehingga Desa setempat memiliki peran yang sangat penting dalam pengangkatan bahkan pelantikan dari pengurus-pengurus yang terdapat di LMDH Wono Lestari ini salah satunya. Perum Perhutani BKPH Senduro pastinya juga memiliki peran dikarenakan kelembagaan ini memiliki suatu kemitraan yang sudah tertulis di SK sehingga baik buruknya proses skema kemitraannya tergantung Lembaga Masyarakat Desa Hutan itu sendiri.

b. Inovasi Tidak Berkembang (Tingkat SDM masyarakat)

Tingkat SDM dari sebagian masyarakat sekitar hutan yang terdapat di Desa Burno bisa dikatakan masih rendah dan menghambat proses skema perhutanan sosial dari Perum Perhutani BKPH Senduro yang dimitrakan dengan LMDH Wono Lestari. Perum Perhutani BKPH Senduro menjadi fasillitator atas apa saja yang diperlukan dan dalam implementasinya masyarakat yang memiliki peran mencolok di skema perhutanan sosial. Perlu diketahui skema perhutanan sosial yang diambil dan disepakati oleh dua pihak yaitu kemitraan

kehutanan, dimana masyarakat lokal di Desa Burno memiliki peran yang begitu besar atas skema ini.

Sebelum pelaksanaan pastinya Perum Perhutani BKPH Senduro melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman ataupun wawasan umum kepada masyarakat. Perum Perhutani BKPH Senduro melaksanakan sosialisasi dan hasilnya sebagian warga bisa dikatakan paham dan seperti yang mampu menerima wawasan tentang skema kemitraan kehutanan yang akan dijalankan ini, faktanya pada momen pelaksanaan mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana menerapkannya.⁶⁵ Hal ini cukup disayangkan bahwasanya SDM masyarakat kurang bisa menerima dikarenakan adanya kesenjangan dan perbedaan ketika kegiatan sosialisasi dan proses implementasi. Padahal berbagai teknik yang dibagikan oleh perwakilan Perum Perhutani ini sangat menguntungkan bagi masyarakat namun dengan hambatan ini regulasi baru dari perhutanan sosial ini kurang berjalan mulus.

Hal ini disampaikan oleh Bpk Antok selaku Mandor tanam yang ada di Resort Senduro ketika diwawancarai beliau menyampaikan:

“wayah sosialisasi masyarakat koyok iyo-iyo o dikei wawasan tentang perhutanan sosial skema kemitraan iki, tapi wayah dipraktekno masyarakat koyok kaget karepe dewe, dadi angel gae awakdewe iki seng ndek Perhutani kudu ngatasi masalah

⁶⁵ Deny, Perhutani BKPH Senduro 11.00 WIB tanggal 5 september 2023

pribadi ben masyarakat, hal seng gak diurusi Perhutani koyok SDM mbek mental iku saiki dadi hal seng kudu diatasi disek ben skema perhutanan sosial iki iso jalan sesuai opo seng dipengeno”

Senada dengan hal ini, Bpk Kodir selaku salah satu warga lokal ketika di wawancarai sebagai berikut:

“awak dewe iki angel mas lek oleh materi-materi koyok ngunu iku, awak dewe pengen langsung praktek, dilalah pas praktek dadi kangelan kabeh dulur-dulur iki”.

Sesuai dengan beberapa narasumber diatas, SDM masyarakat disekitar hutan yang berada di Desa Burno kurang bisa menerima dan kesulitan dengan implementasian regulasi-regulasi baru dari Perum Perhutani meskipun berbagai regulasi dan kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat, dikarenakan mereka sangat dilibatkan dan mendapat peran penuh pada skema perhutanan sosial melalui kemitraan kehutanan. hal ini sangat menjadi hambatan dimana masyarakat disana sebagai pelaku utama sedangkan Perum Perhutani hanya sebagai fasilitator atas apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Masyarakat sekitar hutan sering kali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup untuk mengelola sekaligus pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami regulasi-regulasi yang ada dalam proses perhutanan sosial seperti hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya inisiatif dan kurangnya rasa percaya terhadap diri sendiri dalam

memanfaatkan hasil olah hutan seperti memanfaatkan izin yang sudah diberikan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data ketika proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat sekitar hutan yang ada di Desa Burno, data akan diuraikan dengan hasil temuan peneliti ketika berada langsung di lapangan berdasarkan fokus penelitian yakni mengenai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh BKPH Senduro melalui skema perhutanan sosial.

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Masyarakat lokal setempat dapat memanfaatkan sekaligus menikmati hasil olah hutan yang ada di kawasan hutan milik Perum Perhutani BKPH Senduro. Peralunya, dulu masyarakat menganggap lahan dikawasan hutan itu ilegal dan tidak dapat mereka manfaatkan, lambat laun kebijakan-kebijakan baru pun muncul dan sangat terbuka bagi masyarakat agar dapat dilibatkan dalam pengelolaan dikawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, masyarakat diberi hak dan terlibat penuh dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui berbagai skema perhutanan sosial.

Atas keluarnya program perhutanan sosial di Desa Burno, akhirnya Perum Perhutani BKPH Senduro mencetuskan berbagai program agar masyarakat lebih berdaya yaitu bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH). Perhutanan sosial merupakan program dari pemerintah yang memiliki berbagai skema dalam pemanfaatan hutan, salah satunya yaitu skema kemitraan kehutanan, dalam skema ini perlunya pelibatan masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lokal sehingga perlu adanya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hal ini dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo yang dalam hal ini dilakukan oleh BKPH Senduro selaku pemangku wilayah dari kawasan hutan negara ini. Dalam menjalankan skema perhutanan sosial Perum Perhutani pastinya tidak dapat berjalan sendirian, hal ini dikarenakan menurut aturan dan regulasi perhutanan sosial bahwasanya masyarakat setempat mendapat hak kelola kawasan hutan secara legal.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, menjelaskan bahwasanya Perum Perhutani BKPH Senduro melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh A. Hasdiyansyah tentang bentuk-bentuk pemberdayaan, yakni pemberdayaan sosial. Hasil observasi juga menjelaskan bahwa dalam bentuk pemberdayaan ini masyarakat mendapat suatu keuntungan atau dampak positif dari pemberdayaan sosial ini. Dalam implementasinya, masyarakat sekitar hutan di Desa Burno menerapkan

sistem bagi hasil 70 : 30 dengan Perum Perhutani sehingga dalam skema perhutanan sosial melalui kemitraan kehutanan masyarakat benar-benar menerapkannya.

Hasil observasi juga menjelaskan bahwa Perum Perhutani BKPH Senduro juga melakukan pemberdayaan ekonomi yakni pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kelompok usaha perhutanan sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. KUPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk-produk yang dihasilkan dari hutan untuk dipasarkan sekaligus dijual agar dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat disekitar hutan. KUPS berada dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang didukung oleh pemerintah desa setempat dengan menyediakan berbagai akses.

Perhutani BKPH Senduro beberapa kali melakukan pendampingan sekaligus pelatihan kepada kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang ada di LMDH Wono Lestari, diantaranya KUPS HMT dan KUPS wisata. KUPS HMT merupakan suatu kelompok usaha yang berfokus pada hasil hutan berupa hijauan makan ternak yang berasal dari tanaman atau tumbuhan di kawasan Perhutani yang diberikan pada ternak dalam bentuk segar maupun layu seperti rumput gajah dan dedaunan jenis kaliandra, yang selanjutnya untuk dijadikan pakan hewan seperti sapi perah dan kambing yang populasinya sangat besar di Desa Burno Kecamatan Senduro. Dalam

pendampingan yang dilakukan biasanya pihak Perhutani yang diwakili oleh Mantri beserta Mandornya datang langsung ke LMDH untuk berdiskusi sekaligus bersosialisasi tentang pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

Observasi berikutnya juga menjelaskan tentang pemberdayaan lingkungan yaitu dengan melaksanakan Pelatihan Sistem Tumpang Sari. Merujuk pada mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Burno yaitu peternak sapi perah, sehingga muncul terobosan baru dari Perum Perhutani BKPH Senduro dengan masyarakat Desa Burno yang diwakilkan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan agar diciptakan suatu teknik menanam tumpang sari pada pohon tegakan. Buah hasil dari teknik ini, masyarakat Desa Burno tidak kesulitan dalam mencari pakan ternak dikarenakan rumput gajah yang sudah ditanam di tegakan pohon damar sudah di kelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berada dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari.

2. Proses pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam skema perhutanan sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, Perum Perhutani BKPH Senduro mempersiapkan pelaku pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini banyak pelaku yang dilibatkan dalam proses pemberdayaan seperti Asper selaku pimpinan tertinggi di BKPH Senduro, Mantri/KRPH selaku Kepala Resort, dan Mandor. Semua stakeholder kehutanan yang ada pada

BKPH Senduro terlibat sesuai porsinya masing-masing. Asper selaku pemegang jabatan tertinggi pastinya memiliki porsi atau jangkauan yang lebih luas hal ini dikarenakan beliau yang memiliki kebijakan sesuai arahan dari KPH dalam menjalankan proses pemberdayaan. Mantri/KRPH, beliau menjalankan arahan dari Asper apa saja yang dibutuhkan dan dipersiapkan sesuai regulasi yang dijalankan. Mandor, dalam hal ini mandor memiliki peran membantu KRPH dalam mempersiapkan proses pemberdayaan. Perum Perhutani BKPH Senduro menyiapkan juga lokasi sesuai arahan dari KPH dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan.

Asper Perum Perhutani BKPH Senduro didampingi oleh Mantri dan Mandor turut serta mengkaji dan mengidentifikasi langsung permasalahan di Desa Burno agar pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial ini bisa berdampak positif terhadap masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat ikut serta berpikir dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Masyarakat diminta untuk menciptakan suatu alternatif program kegiatan yang mungkin terlaksana dalam situasi ini, agar nantinya dapat menunjukkan kegiatan yang paling berhasil dan efisien dalam memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat. Perum Perhutani BKPH Senduro merumuskan program yang akan mereka gunakan dan terapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini, BKPH Senduro selaku agen perubahan membantu memformalkan konsep-konsep mereka ke dalam bentuk tulisan, terutama dalam konteks pengajuan proposal kepada

penyandang dana. Hal ini bertujuan agar masyarakat setempat dapat memahami konsep perhutanan sosial yang akan dijalankan dengan menggandeng berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar mendapatkan dana hibah atau bantuan dari pihak lain.

Perum Perhutani BKPH Senduro bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH) Wono Lestari selaku pemangku atau naungan dari masyarakat sekitar hutan agar dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial dapat menciptakan berbagai keuntungan yakni munculnya berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Dalam hal ini KUPS menjadi ekonomi tambahan dari masyarakat setempat melalui berbagai kelompok-kelompok usaha yang dibentuk seperti KUPS HMT dan KUPS Wisata. Dengan membentuk LMDH Wono Lestari, Perum BKPH Senduro pastinya akan mengetahui berbagai kelebihan dan manfaat dari program-program yang sudah dijalankan. Adapun kelebihan dari skema perhutanan sosial ini yakni masyarakat mendapat hak lebih akan pemanfaatan hutan dan dapat mengelola secara legal dari hasil olah hutan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti memunculkan berbagai fakta di lapangan terkait berbagai hambatan dalam skema perhutanan

sosial yakni adanya konflik dan inovasi tidak berkembang yang menjadi hambatan implementasian di kawasan hutan Desa Burno yang masuk di kawasan hutan milik Perum Perhutani BKPH Senduro.

Hambatannya yaitu konflik internal lembaga Ada beberapa faktor yang menyebabkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari ini dikatakan penghambat dalam proses skema perhutanan sosial yaitu kebijakan internal yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa anggota, terdapat pula kesenjangan antara pengurus lama dengan pengurus yang baru sehingga sangat mempengaruhi skema perhutanan sosial ini. Selanjutnya hasil dari observasi ini dapat memunculkan faktor penghambat berikutnya yaitu tingkat SDM dari sebagian masyarakat sekitar hutan yang terdapat di Desa Burno bisa dikatakan masih rendah dan menghambat proses skema perhutanan sosial dari Perum Perhutani BKPH Senduro yang dimitrakan dengan LMDH Wono Lestari. Perum Perhutani BKPH Senduro menjadi fasillitator atas apa saja yang diperlukan dan dalam implementasinya masyarakat yang memiliki peran mencolok di skema perhutanan sosial. Masyarakat sekitar hutan sering kali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup untuk mengelola sekaligus pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami regulasi-regulasi yang ada dalam proses perhutaan sosial seperti hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan kawasan hutan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan berunsur pemberdayaan masyarakat yang berbasis hutan lestari yang memiliki prinsip keberlanjutan yang bertujuan untuk mempertahankan nilai ekologi dari hutan dan nilai ekonomi dari hutan. Pertama, bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH) merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Perum BKPH Senduro dengan cara bermitra akan pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial kemitraan kehutanan. Kedua, pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomis atau pendapatan masyarakat di sektor kehutanan. Ketiga, pelatihan sistem tumpang sari dengan maksud agar masyarakat bisa menerapkan pada lahan atau kawasan hutan yang sudah disediakan oleh Perum Perhutani
2. Proses pemberdayaan yang diterapkan yakni melalui berbagai tahap-tahapan yang sudah dijalankan. Pertama, Perum Perhutani BKPH Senduro menyiapkan pelaku pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini banyak pelaku yang dilibatkan dalam proses pemberdayaan. Kedua, Perum Perhutani BKPH Senduro selaku pemberdaya masyarakat harus mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan demikian program yang sudah dicanangkan akurat dan tidak salah sasaran. Ketiga, masyarakat diminta untuk menciptakan suatu alternatif program kegiatan yang mungkin terlaksana

dalam situasi ini, agar nantinya dapat menunjukkan kegiatan yang paling berhasil dan efisien dalam memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat. Keempat, Perum Perhutani BKPH Senduro selaku agen perubahan membantu memformalkan konsep-konsep mereka ke dalam bentuk tulisan, terutama dalam konteks pengajuan proposal kepada penyandang dana. Kelima, Perum Perhutani BKPH Senduro bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH) Wono Lestari selaku pemangku atau naungan dari masyarakat sekitar hutan agar dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial dapat menciptakan berbagai keuntungan. Keenam, Perum Perhutani BKPH Senduro pastinya mengevaluasi dan berbagai kelebihan dan manfaat dari program-program yang sudah dijalankan.

3. Hambatan yang dihadapi Perum Perhutani BKPH Senduro yaitu konflik internal dari lembaga dikarenakan terdapat permasalahan dalam hal kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Lestari. Kemudian Tingkat SDM dari sebagian masyarakat sekitar hutan yang terdapat di Desa Burno bisa dikatakan masih rendah dan menghambat proses skema perhutanan sosial, karena kurangnya inovasi dalam pelaksanaan pemberdayaan.

B. SARAN

Bagian sub bab ini merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan penelitian pada akhir penulisan. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini bukanlah hasil penelitian yang sempurna, maka perlu adanya peningkatan bagi peneliti selanjutnya supaya memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
2. Bagi Perum Perhutani BKPH Senduro, penelitian ini dijadikan sebagai gambaran untuk tetap semangat dan berusaha lebih baik untuk semua pihak yang terlibat dikawasan hutan, dan senantiasa terus mempunyai ide-ide gagasan dalam menerapkan program-program pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat serta membantu masyarakat hutan dalam sistem pengelolaan hutan kedepannya.
3. Bagi Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan, jadikan penelitian ini sebagai pelecut semangat atas suatu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang bergabung di lembaga ini.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjelaskan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial sebagai upaya melibatkan masyarakat dari Perum Perhutani dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat atas hak kelola hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.
- Azqiya' Achmad Azzqal, Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat Oleh KPH Jember Melalui Program Perhutanan Sosial Di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember 2021).
- Dodirman, Skripsi: *"Analisis Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).
- Dwi Andika Reza, *"Fungsi Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbe Pasmah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kelestarian Hutan Di Desa Mulyosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan"*, 2023.
- Faradhana Annizah dkk, *"Peran Hutan Tanaman Rakyat Dalam Meningkatkan Pendapatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani"*, *Jurnal Belantara* Vol.2, No.2, 2019.
- Giantary Putri Hani, *"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Lokal Dipekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Pringsewu"*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Gunawan Haris dkk, *"Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut"*, *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol.13 No.2, 2019
- Haqqie, S. N. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan*. Semarang: Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Hasantoha Adnan dkk, *"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan"*, (Jakarta Selatan: Penerbit Kemitraan Partnership 2015), hlm. 4.
- Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 10.
- Iriani Margayaningsih Dwi, *"Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa"*.
- Jannah Husnul *"Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Melalui Penataan Lahan Kosong untuk Apotik Hidup di Hutan Kota Giong Siu Mataram"*, *Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat* Vol.4 No.4 2023.

- Jazadi Iwan, “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pola Agroforestry”, Jurnal Pengabdian Makarya Vol.2 No.1, 2023.
- Kita Rimba, “Perhutanan Sosial-Pengertian, Tujuan, Skema, dan Tata Cara Permohonan”, <https://rimbakita.com/perhutanan-sosial/> (5 Februari 2015).
- La Patilaiya Hairudin, James Sinurat, Budi Sarasti, Sri Jumiyati, Asep Supriatna, Budi Hartono, Urhuhe Dena Siburian, Mahaza, Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) Cet Ke-1.
- Maryani Dedeh, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Cet. Ke-1, h.1.
- Mila Fitriana Zuhda, “Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa”, *Media Iuris* Vol. 6 No. 2, June 2023.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm 43-44.
- Mustika Haryanti Shinta, “Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Neta Yulia, Hutan Kemasyarakatan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri”, (Bandar Lampung: Penerbit Pusaka Media 2019), hlm. 16.
- Panjaitan Roimanson, “Metodologi Penelitian”, (Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017), 56.
- Saryono, “Prinsip Dan Aplikasi Dalam Modifikasi Sarana Dan Prasarana Penjas”, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol.5, No.1, April 2008.
- Sidiq Umar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 50
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 246.
- Suharyat Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022). hlm 194.
- Suma Nasobi Niki, Eco-Empowerment: Memberdayakan Membatik Warna Alam Dan Menjaga Lingkungan Masyarakat Pinggiran Taman Nasional Meru Betiri Desa Wonosari Kabupaten Jember, *Jurnal At-Tatwir*, Vol.7, No. 1, 2020

Suwarsono, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2016), hlm 1.

Syalim & syahrums, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" ,(Cipustaka media bandung 2012),hlm 47.

Syofiarti, "*Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat*", Unes Journal od Swara Justisia, Vol. 6, 2023.

Tasya Moendy Agusti, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono, "*Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanafaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No.2, 2020, Hal. 301.

Zakaria Yando, *Perhutanan Sosial: Dari Slogan menjad Program*. (Jakarta: Sekertariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 2018) 58.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Melakukan pengamatan lokasi Perum Perhutani BKPH Senduro di Kab. Lumajang dengan melakukan pengamatan secara langsung
2. Mencari informasi serta melakukan pengamatan terkait *Skema Perhutanan Sosial* yang diterapkan di Perum Perhutani BKPH Senduro
3. Melakukan pengamatan terkait pemberdayaan yang sudah dilaksanakan apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro
4. Mencari informasi dan mengamati pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial.

B. Pedoman Wawancara

- Pedoman Wawancara

Narasumber : Asper/KBKPH Senduro (Bapak Gatot)

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam Skema Perhutanan Sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah di terapkan pemberdayaan masyarakat oleh BKPH Senduro sebelum adanya aturan skema perhutanan sosial? • Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilakukan oleh BKPH Senduro melalui skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Bagaimana cara BKPH Senduro melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Mengapa BKPH Senduro menerapkan skema kemitraan kehutanan di Desa Burno?

<p>1. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja hambatan BKPH Senduro dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Desa Burno? • Bagaimana solusi BKPH Senduro dalam menyikapi hal tersebut?
--	--

Narasumber : Mantri/KRPH Senduro (Bapak Deny)

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam Skema Perhutanan Sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah di terapkan pemberdayaan masyarakat oleh BKPH Senduro sebelum adanya aturan skema perhutanan sosial? • Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilakukan oleh BKPH Senduro melalui skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Bagaimana cara Bpk. Mantri melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Mengapa pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial diterapkan di Desa Burno?
<p>2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja hambatan yang di hadapi Bpk. Mantri dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno? • Bagaimana solusi Bpk. Mantri dalam menyikapi hal tersebut?

Narasumber : Ketua LMDH Wono Lestari (Bpk. Siswanto)

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam Skema Perhutanan Sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah di terapkan pemberdayaan masyarakat oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan sebelum adanya aturan skema perhutanan sosial? • Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Bagaimana cara Bapak selaku ketua LMDH dalam melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Mengapa pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial diterapkan di Desa Burno?
<p>2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja hambatan yang di hadapi Bapak selaku ketua LMDH dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno? • Apa harapan Bapak selaku ketua LMDH dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno?

Narasumber : Masyarakat sekitar hutan (Bpk. Sumali)

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>1. Bentuk pemberdayaan masyarakat dari BKPH Senduro dalam Skema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pernah di terapkan pemberdayaan masyarakat oleh BKPH Senduro terhadap

<p>Perhutanan Sosial di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<p>masyarakat sekitar hutan sebelum adanya aturan skema perhutanan sosial?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Desa Burno? • Mengapa pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial diterapkan di Desa Burno?
<p>2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja hambatan yang di hadapi bapak selaku masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno? • Apa harapan Bapak selaku masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial di Desa Burno?

- Pedoman Observasi

No	Aspek Observasi	Hasil yang Dituju
1.	Tujuan	Mendapatkan gambaran umum terkait permasalahan masyarakat sekitar hutan di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
2.	Objek Observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengamatan Lokasi BKPH Senduro secara langsung. 2. Mencari informasi dan melakukan observasi kondisi BKPH Senduro serta masyarakat sekitar hutan. 3. Melakukan pengamatan mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

		oleh BKPH Senduro terhadap masyarakat sekitar hutan di Desa Burno 4. Mencari permasalahan yang terjadi pada “BKPH Senduro” dan sumber yang diperoleh untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3.	Waktu	Dua minggu (menyesuaikan kondisi lapangan).
4.	Lokasi	Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
5.	Alat Observasi	Alat Tulis (Atk). Kamera

- Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang diteliti
1.	Dokumen kegiatan Perhutani “BKPH Senduro”
2.	Dokumen rencana program Perhutani “BKPH Senduro”
3.	Struktur Perhutani “BKPH Senduro”
4.	Dokumen tujuan didirikan Perhutani “BKPH Senduro”
5.	Laporan hasil kegiatan Perhutani “BKPH Senduro”
6.	Dokumentasi foto penelitian lainnya
7.	Profil Perhutanan Sosial/Kemitraan Kehutanan
8.	Dokumentasi kegiatan Perhutanan Sosial/Kemitraan Kehutanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
 email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.3008/Un.22/6.a/PP.00.9/ 7 /2024 16 Juli 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Perum Perhutani KPH Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Matho'yani Izzul Khaq
 NIM : 204103020003
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Oleh BKPH Senduro Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Muhibbin, S.Ag., M.Si





SURAT SELESAI PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Matho'yani Izzul Khaq
NIM : 204103020003
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Oleh BKPH Senduro Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*" adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 15 November 2024

Saya yang menyatakan



Matho'yani Izzul Khaq
204103020003

JURNAL KEGIATAN

JURNAL PEDOMAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	Tanda Tangan
1	21 Juni 2024	Penyerahan surat izin penelitian ke KPH Probolinggo	
2	1 Juli 2024	Peneliti mengunjungi BKPH Senduro sekaligus wawancara dengan P. Gatot selaku Asper BKPH Senduro	
3	4 Juli 2024	Peneliti mewawancarai P. Deny selaku Mantri/KRPH Senduro	
4	17 Juli 2024	Peneliti mewawancarai P. Siswanto selaku Ketua LMDH Wono Lestari	
5	1 Agustus 2024	Peneliti mewawancarai P. Sumali selaku salah satu masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan	
6	2 September 2024	Peneliti mewawancarai P. Sutari salah satu mandor RPH Senduro dan salah satu masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI KEGIATAN



Perjanjian kerjasama antara Perum
Perhutani BKPH Senduro dengan
LMDH Wono Lestari
Tanggal 07 Juni 2024
Di Wana Wisata Siti Sundari



Pendampingan oleh Perum
Perhutani BKPH Senduro terhadap
Kelompok Usaha Perhutanan
Sosial
Tanggal 07 Juni 2024
Di Wana Wisata Siti Sundari



Pendampingan oleh Perum
Perhutani BKPH Senduro terhadap
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
Tanggal 07 Juni 2024
Di Wana Wisata Siti Sundari

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Asper BKPH
Senduro. Bapak Gatot
Tanggal 1 Juli 2024
Di Kantor BKPH Senduro



Wawancara dengan Mantri/KRPH
Senduro. Bapak Deni
Tanggal 4 Juli 2024
Di Wana Wisata Siti Sundari



Wawancara dengan Ketua LMDH
Wono Lestari. Bapak Siswanto
Tanggal 17 Juli 2024
Di Kediamaannya Desa Burno



Wawancara dengan Bapak Sumali
Tanggal 1 Agustus 2024
Di Kediannya Desa Burno



Wawancara dengan Bapak
Bambang
Tanggal 1 Agustus 2024
Di Kediannya Desa Burno



Wawancara dengan Bapak Mandor
KRPH Senduro
Tanggal 1 Agustus 2024
Di Kediannya Desa Burno

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Matho'yani Izzul Khaq
 Nim : 204103020003
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam
 Fakultas : Dakwah
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lumajang, 19 November 2001
 Alamat : Dusun Ketewel Timur, Desa Sememu,
 Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
 Agama : Islam
 No. Hp : 082245870524
 Email : izzulkhaq1987@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita Sememu Kec. Pasirian : 2006-2008
 SDN Sememu 01 Kec. Pasirian : 2008-2014
 SMPN 01 Pasirian Kec. Pasirian : 2014-2017
 SMAN 01 Pasirian Kec. Pasirian : 2017-2020
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024